

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(Studi Tentang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Dalam
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa
Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Purwandini Mey Ningtias

NIM. 0510313103



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2012

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

**(Studi Tentang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Dalam
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa
Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Purwandini Mey Ningtiyas

NIM. 0510313103



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MALANG

2012

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang.

Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu. (William Feather)

Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda.

(Dale Carnegie)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya Tulis Ini Ku Persembahkan untuk :

- ♥ Sumber Inspirasi dan Kebahagiaan Qu,, Ibunda dan Papa Tercinta,, serta Adik Dounat Qu Tersayang.
- ♥ Soulmate nongkrong dToko buku, bioskop, tmpt kuliner,, kembaran Qu yg bukan kembar,, Eneng Qko Qu.
- ♥ Dan Juga untuk Seluruh Keluarga Besar.

Terima Kasih atas seluruh Kasih Sayang, Doa, Perhatian, Kesabaran, Dukungan serta selalu mendampingi Di Kala Susah maupun Senang.

Para Penyemangat Ku :

- Mare,, Reree,, Pare,, M' Ayip,, Makasih atas omelan2, mbolang en wisata kuliner yg menyenangkan.. ^.^
- Poes,, Moetz,, Phinut,, Wiwit,, Titut.. Para soulmate qu semasa kuliah hingga kini,, makasih yaa temen2 atas segala dukungan dan doanya,, akhirnya aq selesei jg jd mahasiswa.. ^.^
- Temen2 seperjuangan yg sama2 berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir,, nopha, dyan, rianti, ocha, yunita, ronny, yusqi, pras, feбри dan yg laen..
- Makost nyit2 lan bun2 luky yg cerewet dan mendampingi selalu dKost BPM 18.. Ayoo masak sehat en jalan2.. ^.^
- Mb'Chan,, Neng Uweet,, Halime' Sobat2 yg selalu setia mendampingi dari SMA hingga nanti.. makasih atas tawa, airmata dan kejutan2 yg tak terlupa.. ^.^
- Dan Seluruh Temen2 MaFIA Angkatan '05.. Makasih atas pengalaman2 berharga yg Qta lalui..

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
(Studi Tentang Dukungan Budaya Masyarakat Terhadap
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sitirejo Kecamatan
Wagir Kabupaten Malang)

Disusun oleh : **PURWANDINI MEY N.**
NIM : **0510313103**
Fakultas : **Ilmu Administrasi**
Jurusan : **Administrasi Publik**
Konsentrasi : **Administrasi Pembangunan**

Malang, 24 Juli 2012

Komisi Pembimbing,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S
NIP. 19610905 198601 1 002

Dosen Pembimbing II



Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1006

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : **Rabu**
 Tanggal : **1 Agustus 2012**
 Jam : **12.00 – 13.00 WIB**
 Skripsi atas nama : **PURWANDINI MEY N.**
 Judul : **Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Tentang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

KETUA

Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S
NIP. 19610905 198601 1 002

ANGGOTA

Dr. Moch. Saleh Soeaidy, M.A
NIP. 19540212 198103 1 006

ANGGOTA

Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001

ANGGOTA

Drs. Suwondo, M.S
NIP. 19530201 198010 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 24 Juli 2012



Nama : Purwandini Mey N.

Nim : 0510313103

RINGKASAN

Ningtiyas, Purwandini, Mey. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Tentang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)*. Skripsi, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. Ketua Komisi Pembimbing Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Anggota Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA. 122 Hal + viii

Masyarakat Desa Sitirejo sebagai bagian dari masyarakat Jawa mempunyai budaya yang sangat beragam, keberadaan budaya ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah masyarakat Jawa itu sendiri. Ia menjadi simbol yang sarat dengan muatan lokal dan dipraktikkan sebagai salah satu cara dalam pendekatan sosial di masyarakat. Tradisi yang ada juga diperkuat dengan sistem kelembagaan desa dan sistem kemasyarakatan atau kekerabatan yang sudah ada didesa tersebut. Budaya yang ada ini di tunjang dengan kehidupan ekonomi dan budaya religi yang telah mengakar lama di masyarakat desa Sitirejo. Salah satu dari tradisi tersebut adalah tradisi sinoman yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa dan menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis : 1) Dukungan organisasi kemasyarakatan terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Sitirejo. 2) Dukungan budaya masyarakat setempat terhadap implementasi program pemberdayaan di Desa Sitirejo. 3) Pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat Desa Sitirejo.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedang teknik analisa data digunakan analisa model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: Dukungan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo berlangsung terbuka, gotong royong dan partisipatif. Dukungan tersebut antara lain : 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga melalui lembaga PKK, 2) Program Pembangunan melalui PNPM berupa pembangunan prasarana jembatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam perempuan, 3) pembangunan instalasi Biogas.

Dukungan budaya terhadap implementasi program pemberdayaan terlihat dari nilai-nilai kekeluargaan, kerjasama, kegotong-royongan dan kebersamaan yang memberikan kontribusi keberhasilan penerapan program pemberdayaan.

Pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan melalui pendekatan budaya yang ada di masyarakat ikut mendorong pelestarian budaya dan memacu tingkat kemandirian desa dan masyarakat desa Sitirejo.

Kata Kunci: organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat

SUMMARY

Ningtiyas, Purwandini, Mey. 2012. *Rural Society Empowerment (Society Organization Support Towards Rural Society Empowerment in Sitirejo Village, Wagir District, Malang Regency)*. Thesis, Public Administration, Faculty of Administration Sciences, Brawijaya University, Malang. Lecturer Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Supervisor Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA. 122 Hal + viii

Society of Sitirejo as part of the Java Society has a diverse culture, the existence of this culture are inseparable from the history of the Java Society. It became the symbol is loaded with local content and practiced as a means of social approach in the Society. Tradition there is also reinforced by the institutional system of village and family social system or the existing village. Culture which is supported by the economic life and religious culture that has long roots in rural societies Sitirejo. One of these traditions is sinoman tradition practiced by the Javanese and become an integral part of their lives.

The purpose of this study was to describe and analyze about 1) Society organization's support to society empowerment program in the Sitirejo Village 2) Support local culture on the implementation of development programs in the Sitirejo Village 3) Effect of the implementation of rural society empowerment and cultural preservation of the Sitirejo Village

The research method used is descriptive method and qualitative approach while the techniques of data analysis using an interactive model analysis

The results of research show: Society organization's support to society Empowerment Program in Sitirejo Village held open, mutual cooperation and participatory. That's support Such is: 1) Empowerment and Family Welfare through the PKK organization, 2) Development Program through the PNPM in the form of bridge infrastructure and economic empowerment of society through women's savings and loan activities, 3) construction of biogas installations.

Cultural support to the implementation of empowerment programs can be seen from the values of kinship, cooperation, cooperativeness and solidarity that contribute to successful implementation of empowerment programs.

Influence the implementation of empowerment programs through a cultural approach in the society contributed to the preservation of culture and promote the independence of the village and society of Sitirejo.

Keywords: society organization's, rural society empowerment

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian, sehingga tulisan dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Tentang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”**. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Didalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan menyangkut permasalahan penelitian, antara lain : 1) Dukungan organisasi kemasyarakatan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 2) Dukungan budaya masyarakat setempat terhadap implementasi program pemberdayaan di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 3) Pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S dan Bapak Dr. Moch. Saleh Soeaidy, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang beserta seluruh staf yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama proses penelitian.

5. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Administrasi Publik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat dan bantuan selama proses penelitian.
6. Sujud dan terimakasih yang dalam kepada Bapak, Ibu dan Adikku senantiasa memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti demi keberhasilanku.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penulisan dan tak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan dan kebaikan Bapak, ibu, serta rekan-rekan sekalian.

Penulis mengetahui bahwa tak ada sesuatupun yang paling sempurna di dunia ini. Karena itu penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, sesuai dengan keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis berharap kepada semua pihak sudi kiranya memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maupun rekan-rekan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

Malang, Agustus 2012

Penulis

Purwandini Mey N.

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembangunan	11
B. Kebudayaan	14
1. Wujud Kebudayaan	14
2. Kebudayaan Tradisional Masyarakat Desa	18
3. Perubahan Kebudayaan	21
C. Pemberdayaan Masyarakat	23
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	23
2. Proses Pemberdayaan Masyarakat	27
3. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	31
D. Masyarakat Pedesaan	34
1. Masyarakat Desa Dalam Tinjauan Sosial Budaya	34
2. Karakteristik Umum Masyarakat Desa	35
E. Organisasi Kemasyarakatan	39
1. Hakekat Organisasi Masyarakat	39
2. Klasifikasi Organisasi Masyarakat	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48

B. Fokus Penelitian	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian	50
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian	53
G. Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah Desa	56
2. Profil Desa	56
3. Potensi Desa	63
B. Penyajian Data	64
1. Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Setempat terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sitirejo	64
2. Dukungan Budaya Setempat Dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo.....	78
3. Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Budaya Masyarakat Di Desa Sitirejo.....	84
C. Pembahasan Hasil Penelitian	87
1. Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Setempat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat.....	88
2. Dukungan Budaya Setempat Dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo.....	104
3. Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Budaya Masyarakat Di Desa Sitirejo	114

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Klasifikasi Organisasi Masyarakat berdasar Aspek Kehidupan	44
2.	Luas Wilayah Desa/Kelurahan Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang menurut Fungsinya Tahun 2010.....	57
3.	Pertumbuhan Penduduk Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2010.....	58
4.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2010.....	59
5.	Remaja putus sekolah di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2010.....	60
6.	Status Mata Pencaharian Penduduk Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2010.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Klasifikasi Organisasi	44
2.	Bagan Analisis Data Model Interaktif	54
3.	Balai Desa Sitirejo.....	65
4.	Wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Umum Desa Sitirejo di Balai Desa Sitirejo	65
5.	Kegiatan simpan pinjam perempuan di desa Sitirejo	67
6.	Kegiatan pertanian di desa Sitirejo	67
7.	Kegiatan KUD desa Sitirejo dalam distribusi pupuk pada petani ...	68
8.	Sarana Pendidikan di Desa Sitirejo	69
9.	Kegiatan Posyandu desa Sitirejo di balai desa Sitirejo	70
10.	Pertemuan rutin PKK desa Sitirejo di balai desa Sitirejo	70
11.	TPA desa Sitirejo.....	70
12.	Pembangunan jembatan yang membelah desa	72
13.	Instalasi Biogas di desa Sitirejo	72
14.	Area <i>sinoman</i> yang di dalamnya juga terdapat <i>pawonan</i> untuk <i>njenang</i>	80
15.	Para pemuda yang sedang memasang terop dan menata meja pada kegiatan Sinoman	80
16.	Para pemudi dan ibu-ibu memasak didapur pada kegiatan Sinoman H-1	81
17.	Kegiatan sinoman muda-mudi yang siap melayani tamu pada hari H.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas budaya terdiri atas perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar sesama manusia serta antara manusia dan alam semesta. Dalam memasuki milenium ketiga yang antara lain, ditandai dengan terjadinya perubahan tata nilai sebagai akibat adanya interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi yang sedang melanda dunia, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan. Untuk itu, upaya pembangunan karakter bangsa masih membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten sehingga mampu mengatasi ketertinggalan. Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa terus diperkuat dalam rangka mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan bahasa.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang, antara lain, ditandai oleh semakin berkembangnya berbagai dialog lokal, nasional, dan internasional; tumbuhnya pemahaman atas keberagaman; dan menurunnya eskalasi konflik lokal horizontal di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaan kebudayaan

nasional diarahkan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa, melalui: (1) mengaktualisasikan nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta (3) mendorong kerja sama yang sinergis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Namun pada kenyataannya pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal itu diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah keharmonisan bangsa. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks kemajemukan, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat kesetaraan antar kelompok etnis yang berbeda sehingga pengembangan hubungan sosial yang dinamis merupakan strategi dasar bagi terciptanya representasi kolektif yang terdiri atas nilai-nilai lokal kelompok etnis.

Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan kebudayaan, antara lain adalah (1) pembangunan ekonomi yang belum mampu diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan

budaya, (2) kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum optimal yang ditandai oleh (a) adanya disorientasi tata nilai seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial dan rasa cinta tanah air; dan (b) adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur; (3) identitas nasional mengalami penurunan, yang ditandai oleh (a) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (b) kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; serta (4) komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen, yang ditandai oleh (a) terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya seperti pencurian, penyelundupan, dan perusakan benda cagar budaya; (b) adanya berbagai kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan HAM; dan (c) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial masih terbatas.

Sementara itu setiap kehidupan masyarakat diorganisasi atau diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan tempat individu hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan mesra adalah kesatuan kekerabatannya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kaum kerabat lain. Kemudian ada kesatuan-kesatuan di luar kaum kerabat, tetapi masih dalam lingkungan komunitas. Karena setiap masyarakat

manusia dan juga masyarakat desa, terbagi ke dalam lapisan-lapisan, maka tiap orang di luar kaum kerabatnya menghadapi lingkungan orang-orang yang lebih tinggi daripadanya dan yang sama tingkatannya. Di antara golongan terakhir ini ada orang-orang yang dekat padanya dan ada pula orang-orang yang jauh padanya.

Dalam masyarakat di mana pengaruh industrialisasi sudah masuk mendalam, tampak bahwa fungsi kesatuan kekerabatan yang sebelumnya penting dalam banyak sektor kehidupan seseorang, biasanya mulai berkurang dan bersamaan dengan itu adat-istiadat atau tradisi yang mengatur kehidupan kekerabatan sebagai kesatuan mulai mengendor.

Disisi lain kalau diperhatikan dengan seksama, di kalangan masyarakat desa terdapat system pengendalian sosial yang kuat karena sifat kekerabatan dan emosial yang mewarnai. Wujudnya di samping aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pemerintah, terdapat juga system pengawasan sosial yang bersifat informal, antara lain :

- 1) Pujian atau celaan, bagi warga masyarakat yang berperilaku baik atau positif maka sebagai imbalannya (yang bersifat positif) adalah pujian, sanjungan, rasa hormat, kesediaan menolong dan lain-lain, dan sebaliknya yang bersifat negatif, sanksinya berupa celaan, ejekan didesas-desuskan, dikucilkan dari masyarakat dan lain-lain.
- 2) Keluarga terdekat mempunyai beban mengingatkan, memperbaiki atau menyembuhkan perilaku yang meyimpang dari anggotanya.
- 3) Para sesepuh desa, para orang tua dan pemimpin/pejabat desa juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terlaksananya sosial kontrol.

Mekanisme sosial kontrol di pedesaan berlangsung melalui sosialisasi individu dalam lembaga (organisasi) kemasyarakatan, keagamaan dan budaya masyarakat, termasuk pendidikan di lingkungan keluarga, tercermin dari norma, baik norma hukum, adat istiadat, opini public. Juga pekerjaan dan berbagai kegiatan yang sangat padat di pedesaan, menjadi alat sosial kontrol pula.

Berbagai segi kehidupan manusia dapat mewujudkan pranata sosial tertentu, seperti yang tergolong sebagai “lembaga (organisasi) primer” karena arti yang fundamental bagi kehidupan manusia, adalah :

- 1) Organisasi keluarga, yang lahir sebagai perwujudan dari pemenuhan dorongan seksual, mempertahankan jenis dan keturunan serta hubungan primer yang akrab;
- 2) Organisasi perekonomian, sebagai perwujudan dari usaha manusia untuk memperoleh, mengolah dan atau menyalurkan bahan pangan, sandang, serta barang-barang produksi kebendaan yang lain.
- 3) Organisasi keagamaan, sebagai perwujudan dari upaya manusia yang berkaitan dengan yang gaib, Yang Maha Kuasa, atau yang supranatural, perasaan kekaguman kepada alam lingkungan.
- 4) Organisasi pemerintahan, bagi sebagian masyarakat yang masih terbelakang belum dapat dikelompokkan sebagai lembaga primer, meskipun sama pentingnya.

Ada pula yang menyebutkannya dengan istilah lain, seperti Lembaga Pemerintah Desa dan lembaga bukan Lembaga Pemerintah Desa, yang disebutnya dengan “Organisasi Kemasyarakatan” saja.

Organisasi kemasyarakatan itu tumbuh untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau masyarakat, seperti untuk bidang pendidikan (sekolah, pramuka, pesantren); lembaga sosial kemasyarakatan (PKK, Karang taruna, panti asuhan, panti jompo, dll); lembaga kesehatan (poliklinik, BKIA, Posyandu, KB); lembaga adat (gotong royong, subak, sinoman, dll); lembaga kebudayaan (kesenian, olahraga, perkumpulan seni budaya, dll); lembaga ekonomi (KUD, lumbung desa, dll); lembaga keagamaan, (Islam, Kristen, Budha, Hindu).

Setiap lembaga atau organisasi mempunyai norma dan nilai tertentu yang diberlakukan dan dipertahankan serta dikembangkan di kalangan anggota masyarakat. Ia dipatuhi dan dihormati serta menjadi acuan dalam pola tingkah laku masyarakat. Dan bahkan menjadi bagian dari sosiobudaya yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Norma dan nilai itu telah menyatu dengan kehidupan warga desa, sehingga seringkali sudah menjadi gerak reflek dalam kehidupan, jika ada sesuatu tindakan dari anggota masyarakat yang menyimpang dari adat atau kebiasaan yang berlaku, mereka yang mengetahui langsung menegur atau mengingatkan dan sebagainya. Masing-masing anggota masyarakat mengawasi tetap berlakunya norma di masyarakatnya sehingga menjadi pengendali secara umum

Dengan kondisi seperti diatas, maka bila ada program-program yang akan diterapkan di masyarakat desa, maka dukungan organisasi kemasyarakatan yang ada didesa tersebut sangat diperlukan demi keberhasilan implementasi program.

Program yang sering diterapkan pada masyarakat desa adalah program pemberdayaan masyarakat. Secara konsepsional Prijono dan Pranarka (1996) menjelaskan pemberdayaan (*empowerment*) mengandung dua makna pokok,

yakni : (a) *to give power or authority to* (artinya memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri); (b) *to give ability or enable* (artinya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan).

Berdasarkan latarbelakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Tentang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang).

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang serta fenomena diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dukungan organisasi kemasyarakatan setempat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?
2. Bagaimanakah dukungan budaya setempat dalam implementasi program Pemberdayaan di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dukungan organisasi kemasyarakatan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dukungan budaya setempat dalam implementasi program Pemberdayaan di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi ilmiah berupa pengembangan teoritis yang lebih luas dan mendalam tentang peranan organisasi kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat desa.
2. Secara praktis diharapkan berguna bagi kalangan birokrasi pemerintah dan para pelaku (stakeholder) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa melalui organisasi kemasyarakatan yang sudah ada.
3. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat desa.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka hal ini dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat.

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan secara garis besar teoritis yang dikutip dari berbagai buah karya ilmunan yang meliputi teori kebudayaan, teori pembangunan, teori pemberdayaan masyarakat, teori tentang masyarakat pedesaan serta teori tentang organisasi kemasyarakatan.

BAB III. METODE PENELITIAN

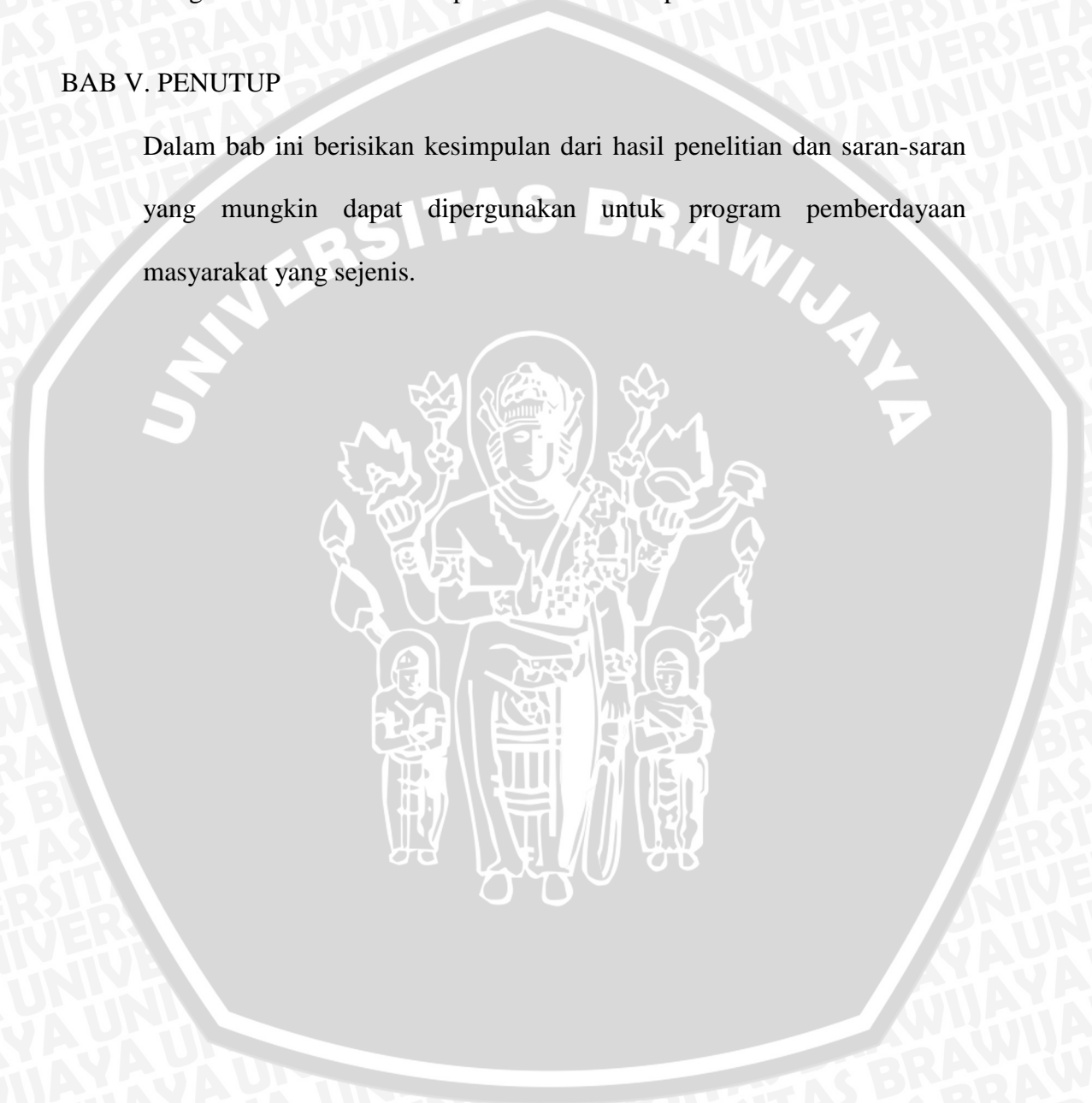
Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian yang mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Kemudian lokasi dan situs penelitian tempat penelitian dilaksanakan, sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data yang menyangkut bagaimana penulis memperoleh data dan analisa data yang mengemukakan bagaimana penulis memerlukan data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sehingga siap dianalisa serta metode analisa yang dilakukan.

BAB IV. PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan deskripsi wilayah penelitian dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data dan gambaran umum lokasi penelitian dan interpretasi data.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan untuk program pemberdayaan masyarakat yang sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Siagian (2003) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Dengan demikian ide pokok pembangunan menurut Siagian adalah, bahwa pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan, pembangunan dilaksanakan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas dicapai melalui pembangunan multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Arif Budiman dalam Saiful (2000) menjelaskan bahwa :

“pembangunan pada akhirnya harus ditujukan kepada manusianya itu sendiri. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif mereka harus merasa bahagia, aman dan bebas dari rasa takut, karenanya harus diciptakan lingkungan politik dan budaya yang kondusif, sehat, dan dinamis. Sebuah proses pembangunan seyogyanya memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Dengan demikian pendekatan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh aspek pembangunan tersebut”.

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2002) mengatakan bahwa pembangunan adalah upaya suatu masyarakat atau bangsa yang merupakan suatu

perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat atau bangsa itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Suryono (2004), yang menyimpulkan bahwa makna pembangunan sebagai atra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu), adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- d. Pembangunan memperoleh sikap dan konsep transedental, sebagai *meta disciplinary phenomom*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideologi of developmentalism*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*). Menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa semakin meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *cultur specific, situation specific* dan *time specific*.

Pendapat diatas memberikan pemahaman bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bersifat dinamis dan multidimensional yang menyangkut sistem sosial secara keseluruhan. Pembangunan yang tidak dijalankan sesuai rencana dapat menciptakan masalah-masalah sosial dan ketidakpuasan terhadap hasil pembangunan. Karena pada dasarnya pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hikmat (2004, 15) mengatakan bahwa permasalahan sosial yang terjadi juga diakibatkan masalah struktural, kebijakan yang keliru, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dimensi tersebut memberikan legitimasi atau penguatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang juga merupakan bentuk dinamika demokratis yang dapat melibatkan semua *stakeholder* pembangunan. Partisipasi masyarakat harus dimaknai sebagai kemampuan untuk berinisiatif dengan cara

melibatkan diri dalam proses pembangunan termasuk menentukan arah dan bentuk program pembangunan yang mereka inginkan.

Dari pengertian-pengertian pembangunan yang telah dikemukakan diatas, apabila dikaji lebih jauh akan tampak terdapat beberapa unsur yang sama, yang kiranya dapat dijadikan sebagai ciri pokok dari konsep pembangunan yaitu :

- a. Adanya pergeseran keadaan yaitu perubahan dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lebih baik dan pertumbuhan yang mengarah pada modernisasi.
- b. Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan.
- c. Perubahan yang terlaksana dilakukan secara sadar dan berencana.
- d. Proses perubahan secara sadar tersebut berdasarkan pada norma-norma atau metode-metode tertentu (rasionalitas) dan bertujuan pada usaha pembinaan bangsa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Tjokrowinoto (1995), ada lima paradigma yang mendasari proses pelaksanaan pembangunan di suatu negara, yaitu pertumbuhan, *welfare state*, *neo ekonomi*, *structuralize* dan *humanizing*. Namun, kelima paradigma ini hanya bergerak pada tiga dimensi yaitu: pertumbuhan, kesejahteraan dan *people centered*. Salah satu paradigma pembangunan yang hingga saat ini masih populer sebagai acuan pembangunan disebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah paradigma "*people centered development*."

Paradigma pembangunan berwawasan manusia mempunyai arti bahwa manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan dan kapasitas manusia merupakan sumberdaya yang paling penting. Dengan demikian Tjokrowinoto menyimpulkan bahwa pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan dan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu: kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Beberapa pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut diatas amatlah bervariasi, tetapi pada dasarnya masih terdapat titik temu atau kesepakatan yang terdapat dalam pengertian tersebut yaitu bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

B. Kebudayaan

1. Wujud Kebudayaan

Dalam sosiologi, konsep kebudayaan (*culture*) merupakan komponen penting dari struktur sosial. Obyek studi pokok sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Menurut Horton dan Hunt (terjemahan 1987) dalam Rahardjo (2004), masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah system norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat tersebut.

Sedangkan menurut seorang ahli anthropologi yang terkemuka, Ralp Linton dalam Rahardjo (2004), mengemukakan bahwa :

”kebudayaan secara umum diartikan sebagai *way of life* suatu masyarakat. *Way of life* dalam pengertian ini tidak sekedar berkaitan dengan bagaimana cara orang untuk bisa hidup secara biologis, melainkan jauh lebih luas dari itu. Dijabarkan secara lebih rinci, *way of life* mencakup *way of thinking* (cara berpikir, bercrepta), *way of feeling* (cara merasa, mengekspresikan rasa), dan *way of doing* (cara berbuat, berkarya). Secara khusus, kebudayaan dapat dipandang sebagai semua cara hidup (*way of life*) yang dipelajari dan diharapkan, yang sama-sama diikuti oleh para anggota dari suatu kelompok masyarakat tertentu”.

Arti kebudayaan diatas sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat (2009), yang mengatakan bahwa :

”kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”.

Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologis, atau kelakuan membabi buta. Bahkan berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan berkebudayaan. Manusia makan pada waktu-waktu tertentu yang dianggapnya wajar dan pantas, ia makan dan minum dengan alat-alat, cara-cara dan sopan santun atau protokol yang sering kali sangat rumit, harus dipelajarinya dahulu dengan susah payah. Manusia berjalan tidak hanya menurut wujud biologisnya yang telah ditentukan oleh alam, tetapi merombak cara berjalannya dengan gaya seperti prajurit, berjalan dengan gaya lemah lembut, berjalan seperti peragawati dan sebagainya, yang semuanya harus dipelajarinya dahulu.

Kebudayaan tersebut meliputi semua bangunan, perkakas, dan benda-benda fisik lainnya maupun teknik-teknik, lembaga-lembaga sosial, sikap-sikap yang dikenal oleh kelompok tersebut. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa kebudayaan tidak saja meliputi cara-cara berpikir dan berbuat yang dianggap

benar oleh suatu kelompok masyarakat, melainkan juga meliputi hasil-hasil daya usaha yang lebih dapat disaksikan dengan mata dan dapat diraba.

Suatu kelompok masyarakat (*society*) seperti diungkapkan Koentjaraningrat (2009) adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi.

Suatu kebudayaan tidak akan lahir tanpa suatu masyarakat, demikian pula dengan masyarakat yang tidak dapat terbentuk tanpa adanya suatu kebudayaan. Tetapi, evolusi dari sebuah kebudayaan dapat dipelajari dan perkembangan dari suatu masyarakat dapat ditelusuri secara terpisah karena pola-pola tingkah laku yang membentuk kebudayaan tertentu dipelajari dan ditularkan dari generasi yang satu ke generasi yang lain (diwariskan) oleh para anggota dari sebuah kelompok masyarakat. Ada baiknya apabila kebudayaan dipandang sebagai sekumpulan pola-pola tingkah laku, atau norma-norma, dan memandang masyarakat terbentuk dari sekumpulan orang-orang, yang tingkah laku dan organisasinya ditentukan oleh kebudayaan tersebut. Digambarkan dengan jelas bahwa kebudayaan berkaitan dengan unsur-unsur seperti ide-ide dan keyakinan-keyakinan, sedangkan masyarakat berhubungan dengan orang. Kedua istilah ini saling berkaitan karena oranglah yang memerankan suatu kebudayaan.

JJ Honigmann dalam bukunya berjudul *The World of Man* dalam Koentjaraningrat (2009) membedakan adanya tiga gejala kebudayaan yaitu (1) *ideas*, (2) *activities*, dan (3) *artifacts*. Sejalan dengan pendapat tersebut, Koentjoroningrat (2009) mengatakan bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya yaitu :

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak tidak dapat di raba atau difoto. Lokasinya ada didalam kepala atau dengan perkataan lain dalam alam pikiran warga masyarakat tempat kebudayaan bersangkutan itu hidup. Kalau warga masyarakat menyatakan gagasan mereka tadi dalam tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal sering berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat bersangkutan. Sekarang kebudayaan ideal dapat tersimpan dalam disket, arsip, koleksi microfilm dan microfish, kartu komputer, silinder dan pita komputer.

Ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat itu. Gagasan itu satu dengan yang lain selalu berkaitan menjadi suatu sistem. Para ahli antropologi dan sosiologi menyebut sistem budaya atau *cultural system*. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang sangat tepat untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini, yaitu adat atau adat-istiadat untuk bentuk jamaknya.

Wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial atau *social system*, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain dari detik-ke detik, dari hari-ke hari, dan dari tahun ke tahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia-manusia dalam suatu masyarakat, sistem sosial itu bersifat

konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasi.

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang diraba, dilihat, dan difoto. Ada benda-benda yang sangat besar seperti pabrik baja; ada benda-benda yang amat kompleks dan canggih, seperti komputer berkapasitas tinggi; atau benda-benda yang besar dan bergerak, suatu kapal tangki minyak; ada bangunan hasil seni arsitek seperti suatu candi yang indah; atau ada pula benda-benda kecil seperti kain batik, atau yang lebih kecil lagi, yaitu kancing baju.

2. Kebudayaan Tradisional Masyarakat Desa

Pola kebudayaan tradisional adalah merupakan produk dari besarnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang hidupnya tergantung kepada alam. Semakin tidak berdaya tetapi di lain pihak semakin tergantung terhadap alam, akan semakin terlihat jelas pola kebudayaan tradisional tersebut.

Menurut Paul H. Landis (1948) dalam Rahardjo (2004) :

“sejauh mana besar-kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa akan ditentukan oleh: (1) sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian; (2) tingkat teknologi mereka; dan (3) sistem produksi yang diterapkan. Ke tiga faktor tersebut secara bersama-sama menjadi faktor determinan bagi terciptanya kebudayaan tradisional, yakni kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakat amat tergantung kepada pertanian, tingkat teknologinya rendah dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga”.

Mengingat semakin rancunya pengertian konsep tradisionalitas dan modernitas, maka akan dipaparkan ciri-ciri pola kebudayaan tradisional masyarakat desa. Mengacu kepada pendapat Paul H. Landis dalam Rahardjo

(2004), secara garis besarnya ciri-ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai konsekuensi dari ketidak berdayaan mereka terhadap alam, maka masyarakat desa yang demikian ini mengembangkan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan/alamnya. Maka masyarakat desa mengembangkan tingkat dan bentuk adaptasi terhadap berbagai kekhususan lingkungan alamnya, sehingga dalam kaitannya dapat dipahami bahwa pola kebudayaan masyarakat desa terikat dan mengikuti karakteristik khas lingkungan/alamnya.
- b. Pola adaptasi yang pasif terhadap lingkungan alam berkaitan dengan rendahnya tingkat inovasi masyarakatnya. Elemen-elemen alam sekalipun bervariasi tetapi mengandung ketetapan dan keteraturan tertentu. Dengan tingkat kepastian yang cukup tinggi terhadap ketetapan dan keteraturan alam tersebut, maka mereka tidak terlalu memerlukan hal-hal yang baru. Semuanya serasa telah diatur dan ditentukan oleh alam.
- c. Faktor alam juga dapat mempengaruhi kepribadian masyarakatnya, sebagai akibat dari kedekatannya dengan alam, orang desa umumnya mengembangkan filsafat hidup yang organis. Artinya, mereka cenderung memandang segala sesuatu sebagai suatu kesatuan. Refleksi dari filsafat semacam ini dalam hubungan antar manusia adalah tebalnya rasa kekeluargaan dan kolektivitas.
- d. Pengaruh alam juga terlihat pada pola kebiasaan hidup yang lamban. Kebiasaan hidup lamban ini disebabkan karena mereka sangat dipengaruhi oleh irama alam yang tetap dan lamban. Maka masyarakat desa sering dianggap statis, bukan hanya karena mereka tidak inovatif tetapi juga karena lamban.

- e. Dominasi alam yang kuat terhadap masyarakat desa juga mengakibatkan tebalnya kepercayaan mereka terhadap takhayul. Takhayul dalam hal ini merupakan proyeksi dari ketakutan atau ketundukan mereka terhadap alam disebabkan karena tidak dapat memahami dan menguasai alam secara benar.
- f. Sikap yang pasif dan adaptatif masyarakat desa terhadap alam juga nampak dalam aspek kebudayaan material mereka yang relatif bersahaja. Kebersahajaan itu dapat dilihat pada arsitektur rumah dan alat-alat pertanian.
- g. Ketundukan masyarakat desa terhadap alam juga menyebabkan rendahnya kesadaran mereka akan waktu. Hal ini dapat dimengerti, karena alam memiliki irama sendiri. Alam tidak menempatkan manusia ke dalam kotak-kotak waktu, melainkan manusia sendirilah yang menciptakan kotak-kotak waktu itu. Seperti tanaman yang memiliki proses alami dengan paket waktu tersendiri terlepas dari pengaturan dan campur tangan manusia. Manusia tinggal menanti proses yang alami tersebut. Akibatnya mereka tidak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya waktu.
- h. Besarnya pengaruh alam juga mengakibatkan orang desa cenderung bersifat praktis. Artinya, mereka tidak begitu mengindahkan segi keindahan dan ornamen-ornamen. Berkaitan dengan sifat praktis ini, masyarakat desa juga cenderung kurang mengindahkan etika dalam pergaulan satu sama lain. Terlebih lagi mereka hidup dalam kelompok dan lingkungan primer, saling akrab, sangat mengenal satu sama lain. Dalam situasi semacam ini kurang memungkinkan mereka untuk menyembunyikan sesuatu dari teman atau tetangga. Maka mereka tidak perlu berbicara panjang-lebar dan berbasa-basi

satu sama lain. Hal ini mendorong tumbuh dan berkembangnya sifat-sifat jujur, terus terang dan suka bersahabat (*friendly*).

- i. Pengaruh alam juga mengakibatkan terciptanya standar moral yang kaku di kalangan masyarakat desa. Moralitas dalam pandangan masyarakat desa adalah sebagai sesuatu yang absolut (*final*). Tidak ada kompromi antara yang baik dan buruk, cenderung pada pemahaman yang bersifat hitam-putih (*clear-cut definition*). Dengan kata lain, tidak ada pengertian yang bersifat relatif mengenai baik dan buruk.

3. Perubahan Kebudayaan

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Menurut Soekanto (1990) :

Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan-perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan.

Apabila diambil definisi kebudayaan menurut Taylor dalam Soekanto (1990), kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, maka perubahan kebudayaan adalah segala perubahan yang mencakup unsur-unsur tersebut. Soemardjan (1982), mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Untuk mempelajari perubahan pada masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab yang melatari terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya suatu perubahan masyarakat, mungkin karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Menurut Soekanto (1990), penyebab perubahan sosial dalam suatu masyarakat dibedakan menjadi dua macam yaitu faktor dari dalam dan luar. Faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor penyebab dari luar masyarakat adalah lingkungan fisik sekitar, peperangan, pengaruh kebudayaan lain.

Perubahan kebudayaan juga terlihat dari organisasi non formal di desa. Seperti kegiatan sinoman misalnya. Sinoman merupakan suatu tradisi bagi para pemuda untuk membantu dalam melancarkan suatu proses hajatan baik itu pernikahan maupun sunatan. Biasanya orang yang melakukan sinoman adalah orang yang masih muda dan belum menikah. Sinoman sangat berguna dalam meningkatkan rasa kebersamaan, gotong royong, keakraban dan manfaat lain untuk masa depan. Orang yang melakukan sinoman juga dilatih berperilaku sopan kepada setiap tamu yang datang yang tentunya harus berpakaian rapi dan seragam. Di pedesaan tradisi seperti ini masih tetap diterapkan, akan tetapi diperkotaan, di kota besar khususnya, tradisi seperti ini yang menerapkan mungkin hanya sebagian kecil dari mereka yang masih punya rasa gotong royong, maklum juga di perkotaan orang-orangnya sibuk semua, mengurus pekerjaan masing-masing. (<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/10/03/82598/Memaknai.Tradisi.Sinoman>).

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) dan pembangunan masyarakat merupakan awal dan aspirasi bagi munculnya strategi pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasi dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya. Hal tersebut dipertegas oleh Suhendra (2006) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep alternative pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif. Konsep tersebut berarti lebih menekankan pada peran serta masyarakat yang berkesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia.

Secara konseptual Prijono dan Pranarka (1996) menjelaskan :

pemberdayaan (*empowerment*) mengandung dua makna pokok, yakni : (a) *to give power or authority to* (artinya memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri); (b) *to give ability or enable* (artinya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan).

Senada dengan pengertian diatas secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian itu menurut Sulistiyani (2004),

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang

kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menjadi berdaya. Makna “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri, makna pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat tapi dari pihak lain yang mempunyai kekuatan dan kemampuan seperti pemerintah dan agen pembaharu lainnya.

Pambudi (2003) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat berarti ;

(1) pemberdayaan bermakna kedalam yang berarti suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat dan sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka; (2) pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat itu Winarni dalam Sulistiyani (2004) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau sumber daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Jadi pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Kartasmita (1996) bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena bila demikian maka sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya;
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah, kesehatan),

serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya; dan

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dipertukarkan dengan pihak lain.

Pengertian pemberdayaan diatas berdasarkan asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, pada dasarnya semua masyarakat mempunyai potensi, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan ini adalah pengembangan daya yang dimiliki masyarakat tersebut. Dari uraian tersebut Sulistiyani (2004) menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Definisi pemberdayaan menurut Suharto (2005) dilihat dari tujuan, proses dan cara pemberdayaan yaitu :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Sedangkan Balai Besar PMD (2005) mengklasifikasi pengertian pemberdayaan masyarakat menjadi tiga yaitu :

- a. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat atau dengan kata lain memampukan dan memandirikan masyarakat.
- c. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan perencanaan, pelaksanaan dan kepemilikan.

Parson (1994) dalam Suharto (2005) mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan (dalam arti luas) dan keterbelakangan. Sedangkan keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Dengan demikian makna hakiki pemberdayaan masyarakat yaitu : (1) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Konsep ini

mencerminkan paradigma pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering and sustainable*”.

2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan dan keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif guna meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kesenjangan dan keterbelakangan, menjadi upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Kemandirian adalah kemampuan mengakomodasi sifat-sifat baik manusia untuk ditampilkan di dalam sikap dan perilaku yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh seorang individu.

Pranarka dan Prijono (1996) mengemukakan, proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dalam tiga fase, yaitu :

- a. Fase initial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi rakyat. Pada fase ini rakyat bersifat pasif melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah;
- b. Fase partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika masuk pada fase emansipatoris, proses pemberdayaan ini berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan di dukung oleh pemerintah bersama masyarakat.
- c. Fase emansipatoris, pada fase ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasi diri. Puncak dan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ketika berada pada fase emansipatoris, untuk dapat merealisasikan hal ini dibutuhkan adanya dua persyaratan pokok, yaitu persyaratan dalam perencanaan pembangunan dan persyaratan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sedangkan Friedmann (1992) melihat beberapa tahap pemberdayaan yaitu:

- a. Pemberdayaan individu, merupakan pemberdayaan keluarga dan setiap anggota keluarga. Asumsinya, apabila setiap anggota keluarga dibangkitkan keberdayaannya, maka unit-unit keluarga berdaya ini akan membangun suatu ke jaringan keberdayaan yang lebih luas lagi. Jaringan yang luas ini akan membentuk keberdayaan sosial. Keluarga disini didudukan sebagai “prosedur sekaligus *costumer*”;
- b. Pemberdayaan ikatan antar individu/kelompok, yang merupakan “*spiral model*”. Pada hakekatnya individu satu dan lainnya diikat oleh ikatan yang disebut keluarga. Demikian antara satu keluarga dan lainnya diikat oleh ikatan berketetanggaan seterusnya sampai ikatan yang lebih tinggi. Pada tingkatan pertama, hubungan yang terjadi disebabkan saling percaya satu sama lain, keyakinan agama, kesamaan keturunan, nasib atau kedekatan bertetangga. Pada tingkatan yang lebih tinggi, hubungan ini dapat terwujud dalam satu gerakan buruh, organisasi politik, dan lainnya;
- c. Pemberdayaan politik, pada hakekatnya dimaksudkan sebagai lawan dari pengabaian politik (*political exclusion*). Pada praktek ekonomi yang terjadi pada saat ini telah ditemukan adanya pengabaian politik dan ekonomi oleh “*urban metropolitan economy*” dan “*multy national economy*” terhadap para orang miskin di pedesaan. Pengabaian ini nampak pada tidak dimasukkannya si miskin ke dalam proses dan struktur akumulasi capital. Pengabaian ini juga nampak pada penggusuran-penggusuran sumber daya tanah yang dimiliki si miskin di pedesaan oleh sektor-sektor di perkotaan.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu ‘senasib’ untuk berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif atau biasa disebut “*collective self-empowerment*”. Dalam kelompok terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama.

Dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Pendapat tentang pentahapan pemberdayaan tersebut

adalah seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004), tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah :

- a. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pelaku pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan kesadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat ini, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahapan pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-ketrampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi dalam lingkungannya.

Menurut F. Wiryanto Jomo dalam Balai Besar PMD (2005) mengungkapkan setidaknya ada lima langkah yang harus dilakukan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat :

- a. Bicara mengenai kebutuhan masyarakat, mengenai masalah-masalah yang ada dan pikiran baru.
- b. Mencari data-data, fakta-fakta, sumber-sumber, pengetahuan teknis, persetujuan pemerintah dan keputusan.
- c. Merencanakan semua langkah dan tindakan dalam pelaksanaan, motivasi dan latihan masyarakat.
- d. Pelaksanaan menurut rencana yang dibuat sebelumnya.
- e. Evaluasi dan pengaturan pemeliharaan proyek.

Dubois dan Miley dalam Suharto (2005) memberi beberapa cara dan teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat :

- a. Membangun relasi pertolongan yang : (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri; (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien.
- b. Membangun komunikasi yang : (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang : (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui : (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam mengembangkan profesional, riset dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Selanjutnya Kartasmita (1997), mengemukakan ada 3 (tiga) hal pokok yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- a. Upaya ini harus terarah (*targeted*), ini yang secara populer disebut pemihakan yang ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dengan tujuan yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan dan kebutuhan mereka, selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena cara sendiri-sendiri masyarakat sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu besar kalau penanggulangan dilakukan secara individu.

Untuk mengukur apakah proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun indikator tersebut menurut Suhendra (2006) yaitu ”

- (a) masyarakat mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat; (b) dapat berjalannya “*bottom up planning*”; (c) memampukan dan aktivitas ekonomi; (d) kemampuan menyiapkan hari depan keluarga; (e) kemampuan

menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.

Dengan demikian berarti proses pemberdayaan yang dimaksud yaitu dimana masyarakat menjadi subyek pelaksana pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menjadi indikator yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Proses pembangunan harus dilakukan dengan berkesinambungan dan melibatkan semua potensi bangsa.

3. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan. Melalui metode diupayakan ditemukan cara yang sederhana tetapi terorganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan.

Strategi pemberdayaan masyarakat secara konseptual menurut Balai Besar PMD (2005), meliputi :

a. Pendekatan Kelompok

Secara ekonomi, sosial, budaya dan politik yang ada di masyarakat khususnya pedesaan dewasa ini masih sangat rendah atau lemah. Hal ini akan sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara sendiri-sendiri, karena itu pendekatan kelompok adalah strategi yang paling efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan potensi dan kemampuan masyarakat dimana pada akhirnya masyarakat akan mempunyai posisi tawar yang kuat dan seimbang.

b. Penguatan Kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan pada dasarnya dilaksanakan karena terdapat asumsi bahwa lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat pada prinsipnya merupakan media yang cukup efektif untuk manajemen masyarakat dalam melakukan serangkaian program dan kegiatan. Dengan memfungsikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan melalui berbagai input pembinaan dan arahan diharapkan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat baik secara individual maupun kelompok. Disisi lain akan terjadi proses pembelajaran dengan

mengorganisir kemampuan dan potensi yang mereka miliki agar berhasil secara optimal (*social learning*).

c. Pendampingan

Melalui pendampingan diharapkan akan dapat memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri. Adapun tugas pendamping meliputi menyelenggarakan dialog untuk menggali kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mengidentifikasi spesifikasi masalah dan mengorganisasi masyarakat untuk mengambil keputusan secara tepat.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan SDM merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya insani masyarakat baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, ketrampilan maupun kinerja mereka. Implementasi pengembangan SDM yaitu diharapkan adanya program-program kegiatan yang bersifat pendidikan dan latihan secara sistematis.

e. Pemberian Stimulan

Stimulan yang diberikan biasanya berupa dana hibah, baik hibah murni maupun bergulir (*revolving fund*). Dengan pemberian stimulan diharapkan ketersediaan masyarakat untuk melakukan swadaya sesuai dengan kemampuan serta mempersiapkan masyarakat secara teknis baik administratif maupun skill.

Menurut Elliot (1987) dalam Pranarka dan Prijono (1996) di dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya “strategi pemberdayaan” yang dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

- a. *The Welfare Approach*. Pendekatan ini mengerah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *sentrum of power*, yang dilatarbelakangi dengan kekuatan potensi lokal masyarakat itu sendiri.
- b. *The Development Approach*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- c. *The Empowerment Approach*. Pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan- didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Hal ini ditambahkan oleh Prasajo (2004).

Terdapat empat strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan/ desa, yaitu (1) memberdayakan masyarakat dengan “mensosialisasikan” peran masyarakat sebagai subyek, (2) mendayagunakan “mekanisme” penyelenggaraan pembangunan/ pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokratis, efektif dan efisien, (3) mobilisasi “sumber daya” manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya, dan (4) memaksimalkan peran pemerintah khususnya pemerintahan kelurahan dalam memfasilitasi dan mengatur guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

Menurut Suharto (2005), pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas atau matra pemberdayaan, yaitu :

- a. Asas Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress managemen, crisis intervention.
- b. Asas Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi.
- c. Asas Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Sedangkan pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (2005) dapat disingkat menjadi 5 P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan:

- a. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
- d. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan

harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- e. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dengan demikian strategi dan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat haruslah dapat menggerakkan kemampuan masyarakat dalam berfikir, bertindak dan terlibat langsung dalam pembangunan. Idealnya dalam proses pemberdayaan dapat terjadi sinergi dari kelompok pemberi dan penerima pemberdayaan itu sendiri. Memang sangat sulit untuk merencanakan ataupun merancang strategi seperti ini, akan tetapi setidaknya kita dapat menawarkan alternatif agar strategi pemberdayaan bisa mencapai tujuan. Inti dari strategi pemberdayaan adalah naiknya daya tawar orang atau kelompok yang belum berdaya.

D. Masyarakat Pedesaan

1. Masyarakat Desa Dalam Tinjauan Sosial Budaya

Pengertian desa menurut kamus Poerwadarminta (1976) adalah:

“sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota); dusun;... 2 dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota);....”.

Desa menurut kamus tersebut terutama dalam arti fisik. Lain lagi dengan istilah desa dalam rembug desa, yang berarti fisik, masyarakat dan pemerintahannya. Istilah lain yang memiliki pengertian hampir sama adalah village. Menurut The Random House Dictionary (1968), village adalah:

“a small community or group of house in a rural area usually smaller than a town and sometimes incorporated as a municipality”

Definisi tersebut mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan masyarakat kecil adalah masyarakat di daerah masyarakat pedesaan. Masyarakat kecil disebut juga *rural community* yang diartikan sebagai masyarakat yang anggota-anggotanya hidup bersama di suatu lokalitas tertentu, yang seorang merasa dirinya bagian dari kelompok, kehidupan mereka meliputi urusan-urusan yang merupakan tanggungjawab bersama dan masing-masing merasa terikat pada norma-norma tertentu yang mereka taati bersama.

Sedangkan menurut Asy'ari (1993) pengertian desa dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya serta aspek hukum.

Aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang).

Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah

Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.

Dilihat dari segi sosial budaya, desa itu tempat dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya pengkotaan, atau dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong-royong.

Dari aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri.

2. Karakteristik Umum Masyarakat Desa

Masyarakat desa selalu dikonotasikan dengan ciri tradisional, kuatnya ikatan dengan alam, eratnya ikatan kelompok, guyup rukun, gotong royong, alon-alon waton kelakon, gremet-gremet asal selamat, paternalistik dan sebagainya, atau yang semakna dengan *gemeinschaft* atau *community* (Asy'ari, 1993).

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun demikian, dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era informasi dan teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah “tidak berlaku”. Berikut ini disampaikan sejumlah karakteristik masyarakat desa, yang terkait dengan etika dan budaya mereka, yang bersifat umum yang selama ini masih sering ditemui. Setidaknya, ini menjadi salah satu wacana bagi kita yang akan bersama-sama hidup di lingkungan pedesaan.

a. Sederhana

Sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan.

Kesederhanaan ini terjadi karena dua hal:

- a. Secara ekonomi memang tidak mampu
- b. Secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri.

b. Mudah curiga

Secara umum, masyarakat desa akan menaruh curiga pada:

- a. Hal-hal baru di luar dirinya yang belum dipahaminya
- b. Seseorang/sekelompok yang bagi komunitas mereka dianggap “asing”

c. Menjunjung tinggi “unggah-ungguh”

Sebagai “orang Timur”, orang desa sangat menjunjung tinggi kesopanan atau “*unggah-ungguh*” apabila:

- a. Bertemu dengan tetangga
- b. Berhadapan dengan pejabat

- c. Berhadapan dengan orang yang lebih tua/dituakan
 - d. Berhadapan dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi
 - e. Berhadapan dengan orang yang tinggi tingkat pendidikannya
- d. Guyub, kekeluargaan

Sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat desa bahwa suasana kekeluargaan dan persaudaraan telah “mendarah-daging” dalam hati sanubari mereka.

- e. Lugas

“Berbicara apa adanya”, itulah ciri khas lain yang dimiliki masyarakat desa. Mereka tidak peduli apakah ucapannya menyakitkan atau tidak bagi orang lain karena memang mereka tidak berencana untuk menyakiti orang lain. Kejujuran, itulah yang mereka miliki.

- f. Tertutup dalam hal keuangan

Biasanya masyarakat desa akan menutup diri manakala ada orang yang bertanya tentang sisi kemampuan ekonomi keluarga. Apalagi jika orang tersebut belum begitu dikenalnya. Katakanlah, mahasiswa yang sedang melakukan tugas penelitian survei pasti akan sulit mendapatkan informasi tentang jumlah pendapatan dan pengeluaran mereka.

- g. Perasaan “minder” terhadap orang kota

Satu fenomena yang ditampakkan oleh masyarakat desa, baik secara langsung ataupun tidak langsung ketika bertemu/bergaul dengan orang kota adalah perasaan mindernya yang cukup besar. Biasanya mereka cenderung untuk diam/tidak banyak omong.

h. Menghargai (“ngajeni”) orang lain

Masyarakat desa benar-benar memperhitungkan kebaikan orang lain yang pernah diterimanya sebagai “patokan” untuk membalas budi sebesar-besarnya. Balas budi ini tidak selalu dalam wujud material tetapi juga dalam bentuk penghargaan sosial atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan “ngajeni”.

i. Jika diberi janji, akan selalu diingat

Bagi masyarakat desa, janji yang pernah diucapkan seseorang/komunitas tertentu akan sangat diingat oleh mereka terlebih berkaitan dengan kebutuhan mereka. Hal ini didasari oleh pengalaman/trauma yang selama ini sering mereka alami, khususnya terhadap janji-janji terkait dengan program pembangunan di daerahnya.

Sebaliknya bila janji itu tidak ditepati, bagi mereka akan menjadi “luka dalam” yang begitu membekas di hati dan sulit menghapuskannya. Contoh kecil: mahasiswa menjanjikan pertemuan di Balai Desa jam 19.00. Dengan tepat waktu, mereka telah siap namun mahasiswa baru datang jam 20.00. Mereka akan sangat kecewa dan selalu mengingat pengalaman itu.

j. Suka gotong-royong

Salah satu ciri khas masyarakat desa yang dimiliki di hampir seluruh kawasan Indonesia adalah gotong-royong atau kalau dalam masyarakat Jawa lebih dikenal dengan istilah “*sambatan*”. Uniknyanya, tanpa harus dimintai pertolongan, serta merta mereka akan “*nyengkuyung*” atau bahu-membahu meringankan beban tetangganya yang sedang punya “*gawe*” atau hajatan. Mereka tidak memperhitungkan kerugian materiil yang dikeluarkan untuk

membantu orang lain. Prinsip mereka: “*rugi sathak, bathi sanak*”. Yang kurang lebih artinya: lebih baik kehilangan materi tetapi mendapat keuntungan bertambah saudara.

k. Demokratis

Sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi di desa, pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini peran BPD (Badan Perwakilan Desa) sangat penting dalam mengakomodasi pendapat/input dari warga.

l. Religius

Masyarakat pedesaan dikenal sangat religius. Artinya, dalam keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya. Secara kolektif, mereka juga mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa keagamaan. Misalnya: tahlilan, rajaban, Jumat Kliwonan, dll.

E. Organisasi Kemasyarakatan

1. Hakekat Organisasi Masyarakat

Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan massa rakyat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya, massa, rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama. Hal itu sesuai dengan teori

kemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Oran Young yang dikutip oleh Arbi Sanit (1986) bahwa,

“Teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralisme menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat.”

Konsep masyarakat yang dikemukakan oleh Arbi Sanit itu searah dengan pemikiran daripada Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang (2007) bahwa:

Rakyat sebagai sebuah kesatuan individu yang beraneka ragam (kepentingan, kebutuhan, cita-cita, dan lain-lainnya) yang hidup dalam keteraturan.

Konsep rakyat (*volk* atau *people*) menjadi konsep sentral bagi seluruh pemikiran Savigny (terutama tentang hukum). Romantismenya bersumber dari rakyat dinamika kerakyatan yang terwujud dalam kebudayaan dan keseniannya. Istilah rakyat mengacu pada entitas kebangsaan. Dalam hal ini konsep rakyat dilihat sebagai kesatuan semangat, terdapat bukan sekedar kumpulan individu-individu karena individu-individu secara satu-persatu tidak memiliki makna sama sekali dihadapkan pada istilah rakyat.

Dukungan massa berarti sekelompok orang yaitu bagian dari rakyat yang sudah sadar politik, sadar akan ketertindasannya serta keharusan untuk melawan. Berdasarkan pemahaman dukungan kelompok tersebut maka Arbi Sanit (1986) juga mengutip pendapat Arthur F. Bantley tentang suatu kelompok yaitu:

“... diartikan sebagai suatu perikatan manusia dari suatu masyarakat dapat dikenali, namun bukan sebagai suatu kumpulan massa yang secara fisik terbedakan dengan kumpulan-kumpulan massa lainnya, akan tetapi merupakan suatu aktivitas dari sekumpulan orang banyak yang tidak menafikan orang-orang yang berpartisipasi di dalam aktivitas tersebut untuk mengambil bagian di dalam berbagai kegiatan kelompok lainnya.”

Prinsip garis massa adalah prinsip yang mengatur agar organisasi tidak jatuh pada komandoisme atau kecenderungan untuk bergerak jauh meninggalkan kesadaran politik obyektif massa dan situasi politik sehingga organisasi hanya bergerak berdasarkan pikiran-pikiran subyektifnya saja yang jauh diatas keberanian massa rakyat. Massa rakyat adalah tulang punggung dalam perjuangan demokrasi, massa rakyatlah yang akan bergerak untuk merebut kekuasaan dan masa depannya untuk kepentingan massa rakyat juga. Garis massa hanya akan bisa dimiliki oleh organisasi progresif yang selalu berada dalam perjuangan bersama dengan massa rakyat. Garis massa pun mempertegas arti bahwa perjuangan ini semua adalah untuk kepentingan massa rakyat. Dalam pelaksanaannya setiap anggota harus hidup ditengah massa rakyat, mendengar pandangan-pandangan rakyat dan kemudian menyimpulkan serta melaporkan pada organ yang diatasnya. Organ yang lebih atas kemudian mempelajari dan memutuskan langkah dan gerak yang harus diambil oleh anggota pada massa rakyat dimana dia tinggal dan berjuang bersama. Massa rakyat adalah tulang punggung dalam perjuangan demokrasi, massa rakyatlah yang akan bergerak untuk merebut kekuasaan dan masa depannya untuk kepentingan massa rakyat juga. Garis massa hanya bisa dimiliki oleh organisasi yang selalu berada dalam perjuangan bersama dengan massa rakyat.

Dalam perkembangan masyarakat ke arah demokratisasi, gejala kegiatan berorganisasi juga tumbuh rasional mengikuti tuntutan alamiah setiap orang dalam bermasyarakat. Jika tuntutan bermasyarakat adalah kecenderungan alamiah setiap individu manusia sebagai makhluk sosial, maka kecenderungan untuk berkelompok dan berorganisasi juga merupakan kecenderungan alamiah yang

terdapat dalam setiap masyarakat manusia itu. Terlihat jelas bahwa individu terlibat di dalam aktivitas kelompok/organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya karena pada kenyataannya individu itu tidak dapat secara sendiri memenuhi kebutuhannya searah dengan pertumbuhan diri serta perkembangan lingkungannya.

2. Klasifikasi Organisasi Masyarakat

Klasifikasi yang umum digunakan di kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membedakan antara organisasi pemerintah dengan organisasi non pemerintah. Secara prinsipil perbedaan di antaranya terletak pada keanggotaan, kewenangan mengatur, keabsahan menghukum dan penggunaan kekerasan. Apabila menjadi anggota organisasi masyarakat diperlukan kesukarelaan dari seseorang menjadi warga atau penduduk dari negara di mana ia berdomisili. Sementara itu aturan yang dikeluarkan oleh organisasi masyarakat, lingkup keberlakuannya terbatas pada anggotanya. Karena itu peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi masyarakat yang satu dapat bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi lainnya. Berbeda dengan itu ialah adanya kewenangan pemerintah untuk memberlakukan suatu peraturan kepada segenap penduduk dan warga negara sehingga kemungkinan kesimpungansiuran dapat diperkecil atau ditiadakan. Selain itu organisasi masyarakat perlu mengadakan persetujuan dengan anggota yang di hukumnya, sedangkan pemerintahnya tidak memerlukan kegiatan seperti itu karena rakyat wajib memenuhi peraturan yang dikeluarkan pemerintah berwenang melakukan paksaan kepada warganya. Kewenangan pemerintah melakukan paksaan kepada warganya tersebut berkaitan dengan teori

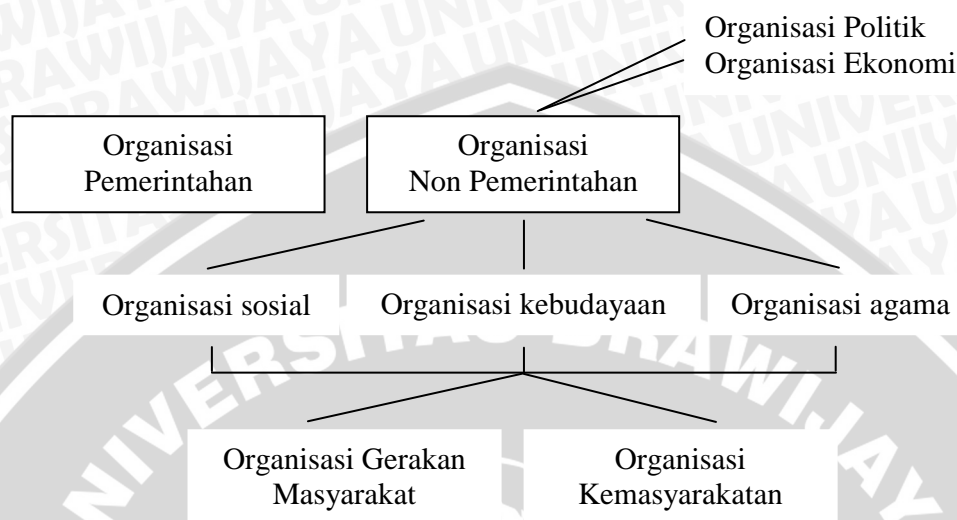
negara dari sudut “dominasi” Hans Kelsen bahwa pemerintah sebagai organ negara mempunyai hubungan antara satu pihak yang mengatur dengan pihak lain yang diatur. Hans Kelsen dalam Antonius dan Manulang (2007) menambahkan bahwa:

Letaknya ada di dalam fakta tatanan ini merupakan tatanan paksa. Negara adalah organisasi politik karena merupakan tatanan yang mengatur penggunaan paksaan, karena negara memonopoli penggunaan paksaan. Namun demikian, seperti kita ketahui, monopoli penggunaan paksaan ini merupakan salah satu karakter penting dari hukum. Negara adalah suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politik karena negara ini merupakan sebuah komunitas yang dibentuk oleh suatu tatanan yang bersifat memaksakan, dan tatanan paksa ini adalah hukum.

Tatanan hukum dalam konsep dominasi yang bersifat sosiologis itu diterapkan pada negara, karena hanya dominasi yang dianggap “syah” yang bisa dianggap sebagai negara. Kesahihan tatanan hukum dinyatakan oleh individu-individu pelaku dalam hal ini adalah warga negara terutama anggota-anggota daripada suatu organisasi masyarakat. Sejumlah individu membentuk suatu komunitas karena suatu tatanan norma mengatur hubungan timbal baliknya dalam hal ini negara dipostulasikan sebagai kehendak kolektif melebihi dan melampaui kehendak-kehendak dari para subyeknya.

Berdasarkan perbedaan prinsipil di atas maka jelas dibedakan antara organisasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan begitu pula dengan organisasi pemerintahan. Pengaruh pemerintah ke dalam organisasi non pemerintah tersebut terbatas sepanjang pemerintah memberlakukan peraturan yang dibuatnya dan berlaku umum. Berikut ini gambaran bagan mengenai klasifikasi organisasi seperti di jelaskan oleh Arbi Sanit (1986) :

Gambar 1.
KLASIFIKASI ORGANISASI



Sebagaimana telah diketahui bahwa aktivitas organisasi masyarakat berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh anggota atau pendukung organisasi itu sendiri maka sesuai dengan ilustrasi bagan di atas untuk dapat mengetahui basis masing-masing organisasi masyarakat berdasar aspek kehidupan maka Arbi Sanit (1986) menguraikan lebih lanjut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Klasifikasi Organisasi Masyarakat berdasar Aspek Kehidupan

ORGANISASI MASYARAKAT	ASPEK KEHIDUPAN
1. Organisasi Politik	Mengacu kepada kekuasaan negara baik dalam rangka memperoleh manfaat darinya, maupun dalam rangka menguasainya
2. Organisasi Ekonomi	Mencari keuntungan materi berdasarkan tatacara berinteraksi yang didasarkan kepada perhitungan untung rugi
3. Organisasi Sosial, Kebudayaan dan Agama	Memusatkan perhatian untuk merealisasikan dan melindungi kepentingan masyarakat tanpa mencari keuntungan materi untuk anggota dan organisasi tersebut dan bukan untuk memegang kendali atas kekuasaan negara.

Keseluruhan organisasi yang berada dalam lingkungan aspek kehidupan masih belum dapat membedakan mana yang berbasis organisasi kemasyarakatan atau organisasi gerakan masyarakat dari antara organisasi sosial, kebudayaan dan agama.

Oleh karena itu perlu menggunakan indikator yang dilihat dari :

a. Segi keterlibatan masyarakat

Dapat dibedakan antara sosial, budaya, dan agama yang melibatkan masyarakat secara dan jauh melebihi batas formal organisasi dengan organisasi yang hanya menyertakan masyarakat berdasarkan keterkaitan mereka kepada struktur organisasi seperti keanggotaan dalam organisasi.

b. Segi keanggotaan.

Pada organisasi gerakan masyarakat, keanggotaan dipilih secara cermat, karena mereka yang berada di dalam organisasi harus bekerja secara teknis di dalam masyarakat luas, untuk menggerakkan mereka kepada tujuan masyarakat yang sudah disusun oleh organisasi. Jadi anggota yang terpilih itu adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat supaya berdikari mencapai tujuannya (mengutamakan tingkat pengkaderan).

Lain halnya pada organisasi kemasyarakatan yang tidak membatasi jumlah anggota. Jumlah anggota seringkali dijadikan sebagai pertimbangan utama untuk menyatakan tingkat kekuatan atau kebesaran organisasi (menekankan sifat massal).

c. Tujuan organisasi

- Tujuan organisasi masyarakat lebih spesifik, jelas, dan operasional sehingga mudah dikenali baik oleh anggota maupun oleh masyarakat yang

hendak digerakkan. Keperluannya ialah supaya tujuan tersebut menjadi kenyataan dan dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- Tujuan organisasi kemasyarakatan biasanya diformulasikan secara umum, bermakna luas dan mempesona, walaupun belum operasional. Tujuan itu diharapkan dapat mencakup kalangan yang luas dan selanjutnya anggota masyarakat luas yang dicakup tersebut menyadari akan persatuan mereka.

d. Ideologi

Kedua jenis organisasi memiliki persamaan untuk menerima peranan ideologi di dalam kehidupannya. Perbedaannya adalah pada organisasi gerakan masyarakat, ideologi dianggap sebagai gambaran umum dari apa yang sebaiknya dicapai oleh organisasi dan sudah menjadi tugas organisasi untuk merumuskan tujuan yang jelas dan bersifat operasional tersebut. Namun, dalam organisasi kemasyarakatan ideologi memegang peranan penting dalam mempertajam formulasi tujuan organisasi, merekatkan semua anggota yang berjumlah besar, memberikan identitas kepada semua anggota dan ideologi digunakan untuk menuntut organisasi dalam memainkan peranannya terhadap kehidupan politik di Indonesia.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa basis organisasi kemasyarakatan memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- Organisasi di luar organisasi pemerintahan
- Tidak bermotif keuntungan dalam kegiatannya
- Lebih melibatkan anggota dalam kegiatannya
- Hasil kegiatan lebih dinikmati anggota

- Keanggotaan bersifat massa
- Melakukan kegiatan politik disamping perjuangan teknis keorganisasian
- Cukup berkepentingan akan ideologi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini sangat sesuai untuk memahami dan menganalisis bagaimana peran tradisi sinoman dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Kirk dan Miller dalam Moleong (2005) mengatakan bahwa :

pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya maupun dalam peristilahannya. Makna yang terkandung dalam pendekatan kualitatif ini ditunjukkan melalui implementasi di lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap suatu gejala, baik pengamatan langsung melalui informasi maupun dengan mempelajari data-data untuk dapat menjawab pertanyaan.

Pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya :

1. metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila nantinya berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. metode kualitatif lebih peka dan cepat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang dijadikan sebagai wilayah pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti.

Adapun fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ditinjau dari :
 - a. Program Pembangunan Desa.
 - b. Program Pemberdayaan Desa yang meliputi :
 - 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 2) Program Pembangunan PNPM.
 - 3) Pelaku Pemberdayaan Masyarakat.
2. Dukungan Organisasi kemasyarakatan setempat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ditinjau dari :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat melalui organisasi social dan Tradisi di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
 - b. Peranan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang meliputi :
 - 1) Masyarakat setempat.
 - 2) Karang Taruna.

3) LPMD.

4) Kepala Desa.

c. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peranan budaya dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang :

1) Faktor Internal, yaitu faktor dari dalam yang meliputi sumber daya manusia serta stakeholder yang terlibat.

2) Faktor Eksternal, yaitu faktor dari luar yang meliputi aspek ekonomi sosial dan budaya.

3. Pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang ditinjau dari :

a. Aspek budaya, meliputi upaya mempertahankan dan melestarikan tradisi sinoman.

b. Aspek sosial, meliputi rasa tolong menolong, kegotong-royongan dan saling bertoleransi.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam kaitannya dengan penentuan lokasi penelitian maka untuk penentuan lokasi perlu dipertimbangkan apakah lokasi sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang ditetapkan adalah Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Desa Sitirejo Kecamatan Wagir merupakan salah satu desa yang mempertahankan organisasi sosial dan budaya masyarakat setempat sebagai adat-istiadat.
- b. Desa Sitirejo Kecamatan Wagir adalah termasuk kategori desa yang menjadikan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu pendukung penerapan program rutin desa.

2. Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dengan mengkaji adanya fenomena yang ada. Dalam hal ini yang menjadi situs penelitian desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah seseorang atau sesuatu yang dipilih sebagai nara sumber untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data terdiri dari 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Informasi sebagai sumber data utama dipilih secara *purposive*, hal ini didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kelompok sasaran dan petugas yang ikut terlibat dalam pelaksanaan sinoman, yaitu:

- a. Aparat Desa Sitirejo.

- b. Masyarakat atau kelompok masyarakat.
2. Data sekunder, adalah data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen yang relevan dengan tulisan ini. Moleong (2005) mengemukakan bahwa data sekunder merupakan data yang bersumber di luar kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder dapat berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen, arsip-arsip dan lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang menjadi instrument utama yang terjun ke lapangan dan berusaha sendiri mengumpulkan informasi dan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

1. Studi Kepustakaan (*library research*): pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan artikel-artikel yang relevan dengan pokok bahasan.
2. Studi lapangan (*field research*): pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - a. Observasi: cara memperoleh data dengan pengamatan secara langsung di lapangan pada obyek penelitian.
 - b. Wawancara: suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan dialog langsung dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Terdapat 2 jenis wawancara:

- 1). Wawancara terstruktur: wawancara yang dalam melakukan wawancara telah dibekali daftar pertanyaan yang akan diajukan pada informan seputar data-data yang dibutuhkan peneliti.
- 2). Wawancara tidak terstruktur: jenis wawancara dimana pewawancara menentukan sendiri pertanyaan yang diajukan kepada informan. Dengan wawancara tidak struktur ini maka akan diperoleh informasi yang lebih luas mengenai fenomena yang sedang diteliti.
3. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi ini berupa foto-foto hasil kegiatan, dokumen berupa buku pedoman pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan untuk melengkapi teknik wawancara dan observasi, yang ketiganya nanti saling melengkapi satu sama lain dalam artian data yang diperoleh melalui wawancara dapat dilengkapi pula dengan hasil studi dokumentasi.

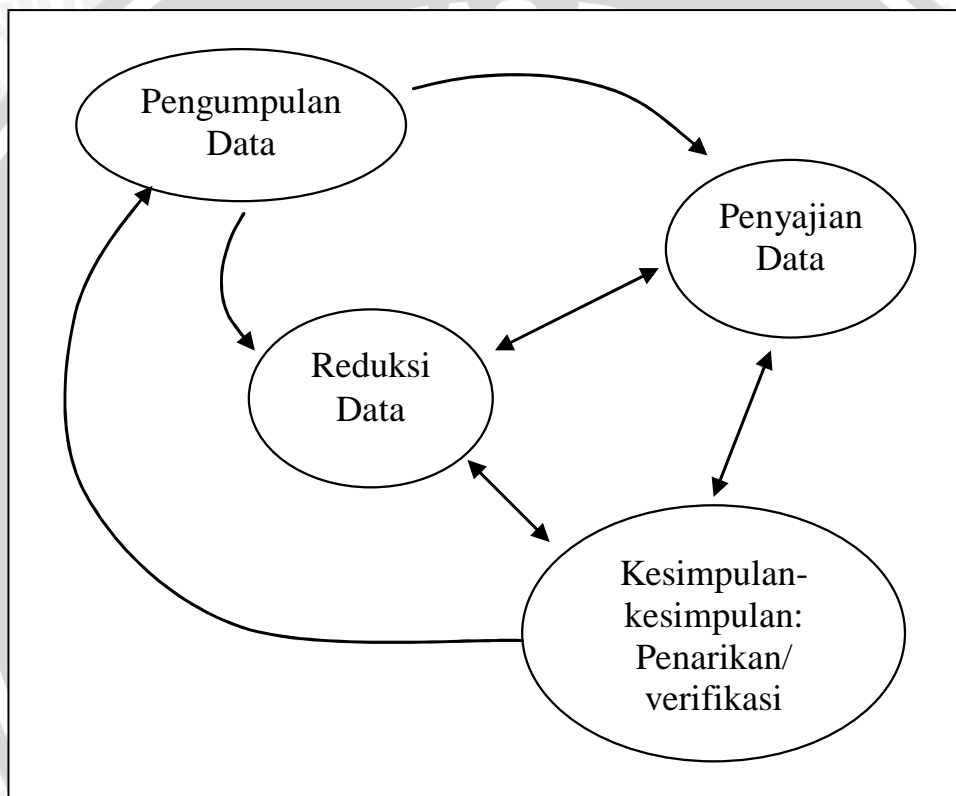
F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data yakni :

1. Peneliti sendiri, yang merupakan saran pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisa data.
2. Pedoman wawancara, merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan.
3. Perangkat penunjang lain yang merupakan buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh di lokasi penelitian.

G. Metode Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam analisa model interaktif ada tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada setiap komponen utama tersebut.



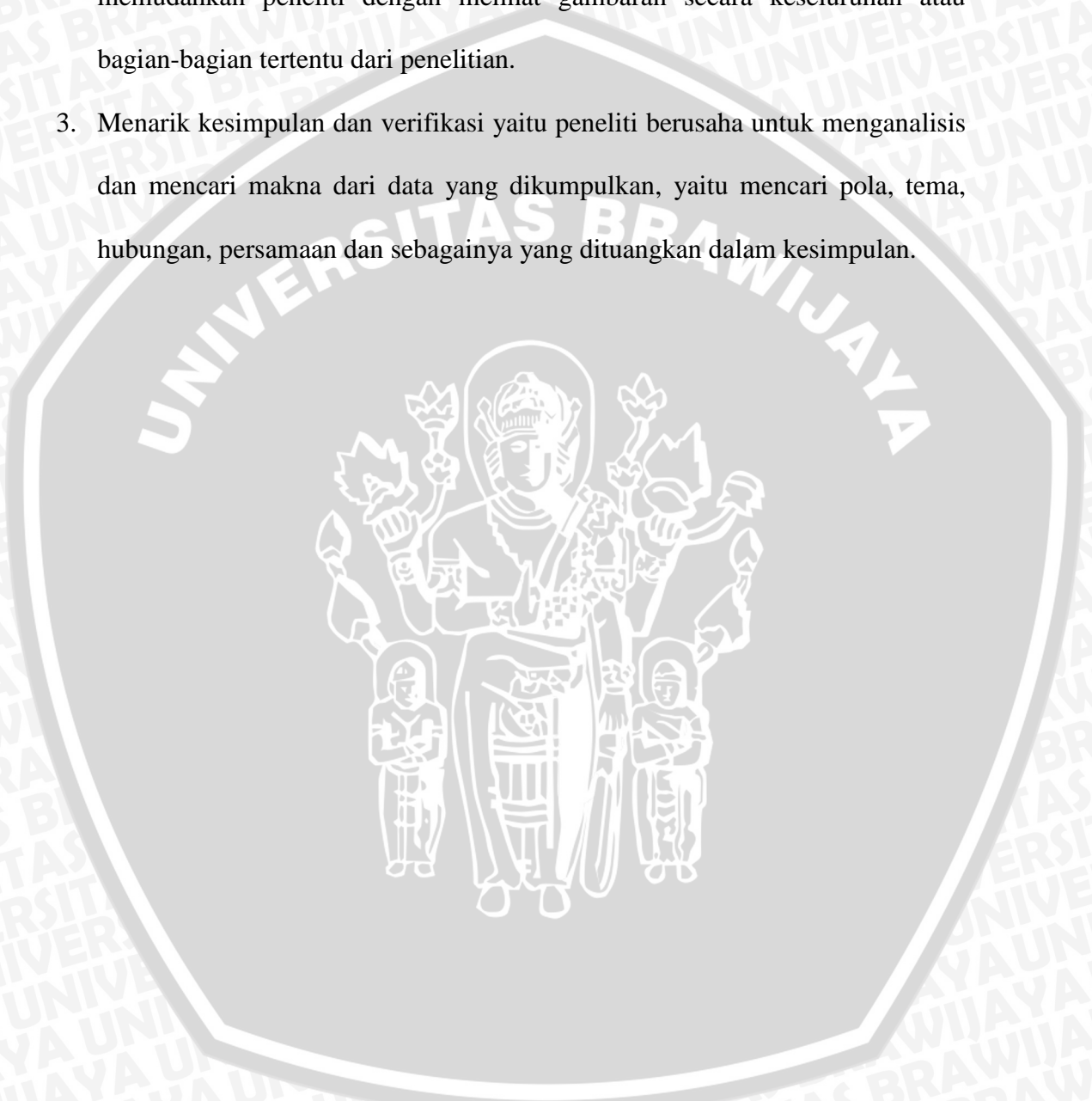
Gambar 2
Bagan Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman, diterjemahkan Rohadi, 1992:h. 20

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Oleh karena itu reduksi data merupakan suatu

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu

2. Penyajian data: atau biasa disebut *display* data yang dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dengan melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi yaitu peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berikut ini akan diuraikan tentang gambaran profil Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang menjadi lokasi penelitian. Adapun tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memberikan gambaran secara ringkas dan menyeluruh tentang aspek-aspek pokok keadaan Desa Sitirejo.

1. Sejarah Desa

Setiap wilayah dan daerah rata-rata memiliki sejarah, begitu juga dengan sejarah Desa Sitirejo. Menurut cerita dari beberapa sesepuh di desa yang mengetahui sejarah tentang desa menuturkan bahwa awal lahirnya Desa Sitirejo yaitu sebelum masa kemerdekaan yang sebelumnya telah bernama “Sittinggil” yang artinya adalah “Lemah Duwur” atau dengan kata lain tanah tinggi, yang dikarenakan kedudukan tanahnya lebih tinggi yang dilihat dari segala arah. Dan setelah Indonesia merdeka nama desa telah disempurnakan dan diganti menjadi Sitirejo yang memiliki 5 dusun, yaitu : Dusun Lemah Duwur, Dusun Reco, Dusun Temu, Dusun Buwek, Dusun Sariasri.

2. Profil Desa

a. Letal Geografis

Desa Sitirejo sebagai ibukota Kecamatan secara struktural merupakan bagian integral dalam sistem perwilayahan Kecamatan Wagir.

Batas-batas wilayah Desa Sitirejo adalah sebagai berikut :



- 1) Utara : Kelurahan Bakalankrajan
- 2) Selatan: Desa Mendalanwangi
- 3) Barat : Desa Parangargo
- 4) Timur : Kelurahan Kebonsari

Dilihat dari jalur lalu lintas utama Kecamatan Wagir, Desa Sitirejo merupakan pintu gerbang bagi Kecamatan Wagir dari arah timur. Hal ini menjadikan Desa Sitirejo termasuk kawasan yang strategis karena juga sebagai daerah penyangga Kota Malang. Dan hal ini membawa dampak yang besar bagi mata pencaharian penduduk. Mobilitas warga, pola hidup dan budaya masyarakatnya. Pengaruh tersebut tampak pada tata guna lahan yang ada, seperti permukiman 56,84 Ha, pertanian sawah 160 Ha, ladang 33 Ha, sarana dan prasarana bangunan umum dan jalan 7,106 Ha. Secara keseluruhan luas lahan Desa/Kelurahan Sitirejo berdasarkan fungsinya dapat dilihat dari tabel 2 yaitu :

Tabel 2. Luas Wilayah Desa/Kelurahan Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang menurut Fungsinya Tahun 2010

NO.	PERUNTUKAN LAHAN	LUAS (HA)
1	Permukiman	
	a. Permukiman Real Esatate	3,1
	b. Permukiman KPR BTN	-
	c. Permukiman Umum	53,74
2	Pertanian dan Sawah	
	a. Sawah Irigasi	66
	b. Sawah Setengah Teknis	94
3	Ladang/ Tegalan	33
4	Sarana dan prasarana umum	
	a. Perkantoran	0,1
	b. Sekolah	1,5
	c. Pasar	0,06
	d. Jalan	3,5
	e. Lapangan sepakbola	0,5
	f. Makam	1,5
	Total Luas Wilayah Desa	257

Sumber : Profil Desa Sitirejo 2010

b. Kependudukan

Jumlah penduduk yang mendiami Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang pada tahun 2010 adalah 8207 orang/jiwa atau 2111 Kepala Keluarga (KK) dengan perincian jumlah laki-laki \pm 4171 orang/jiwa dan untuk jumlah penduduk perempuan \pm 4036 orang/jiwa. Dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung fluktuatif atau naik turun. Sebagian penduduk memeluk agama islam, nasrani, hindu, dan budha yang masing-masing hidup rukun dan tersebar di 34 RT dan 5 RW.

Sebaran penduduk Sitirejo terfokus pada 5 lokasi RW yang masing-masing terpisah, tidak terpusat atau terkumpul dalam satu kawasan. Masing-masing RW rata-rata penduduknya padat, kecuali RW 5 yang merupakan kawasan perumahan baru. Sedangkan konsentrasi penduduk miskin pada umumnya tersebar merata di 4 RW. RW 2 dan RW 1 serta sekitar pasar Sitirejo merupakan wilayah dengan penduduk miskin yang cukup tinggi.

Adapun pertumbuhan penduduk Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2010

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah penduduk tahun ini	8207
2	Jumlah penduduk tahun lalu	8121
3	Jumlah penduduk KK miskin tahun ini	215
4	Jumlah penduduk KK miskin tahun lalu	223
5	Jumlah penduduk penerima BLT tahun ini	262
6	Jumlah penduduk penerima BLT tahun lalu	262
7	Jumlah penduduk penerima raskin tahun ini	218
8	Jumlah penduduk penerima raskin tahun lalu	262

Sumber : Profil Desa Sitirejo 2010

Berdasarkan tabel 3 jumlah penduduk tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 86 orang dari jumlah penduduk tahun 2009. jumlah keluarga miskin turun sebesar 8 KK di banding tahun 2009. jumlah penduduk penerima BLT tahun 2010 dengan tahun 2009 sama. Sedangkan penduduk penerima raskin tahun 2010 turun sebesar 44 KK dari tahun 2009.

Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang mempunyai sarana pendidikan formal mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP. Sedangkan sekolah Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi tidak ada. Sehingga para penduduk yang ingin melanjutkan pendidikan SMA harus ke desa lain atau di wilayah Kota Malang. Sehingga rata-rata tingkat pendidikan penduduk desa Sitirejo hanya tamatan SD.

Adapun klasifikasi tingkat pendidikan penduduk dapat di lihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	1.700
2	Tamat SD	2.267
3	Tamat SMP	1.602
4	Tamat SMA	1.394
5	Tamat Perguruan Tinggi	149
Jumlah		7.112

Sumber : Profil Desa Sitirejo 2010

Berdasarkan tabel 4, tingkat pendidikan penduduk desa Sitirejo umumnya berpendidikan rendah yaitu hanya tamatan SD, berturut-turut tingkat pendidikan penduduk desa Sitirejo sebagai berikut sebanyak 2.267 orang tamat SD, tidak tamat SD sebanyak 1.700 orang, SMP 1.602 orang, SMA 1.394 orang, dan tamat perguruan tinggi hanya 149 orang.

Sedangkan saat ini tahun 2010, remaja Desa Sitirejo yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya berjumlah 46 anak. Hal ini dikarenakan remaja-remaja tersebut mengalami putus sekolah karena ketiadaan biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ada 20 orang yang mengalami putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD), 14 orang pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 12 orang. Remaja putus sekolah di desa Sitirejo kecamatan Wagir seperti dijelaskan pada tabel 5.

Tabel 5. Remaja putus sekolah di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	20
3	SMP	14
4	SMA	12
Jumlah		46

Sumber : Profil Desa Sitirejo 2010

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial di Desa Sitirejo pada umumnya hampir sama dengan desa lain di Kecamatan Wagir. Terlihatnya kehidupan sosial di desa, yang masih hidup saat ini adalah kegiatan kerja bakti dan gotong royong seperti mendirikan rumah, membantu penyelenggaraan perkawinan, khitan, takziah atau acara melayat kematian.

Keberadaan kaum pemuda dan perempuan dalam kegiatan desa juga membawa warna baru dalam kehidupan pembangunan sosial desa. Hal tersebut tercermin dalam organisasi karang taruna pada tiap-tiap RW, PKK, dan majelis taklim.

Letak Desa Sitirejo yang berada diantara Kecamatan Wagir dengan Kota Malang tentu membuat pola kehidupan kota serta problematikanya mulai dirasakan oleh warga Desa Sitirejo khususnya di lingkungan RW 1, RW 2, RW 4 dan RW 5 yang mayoritas adalah warga baru yang tingkat kehidupannya relatif lebih baik.

Perekonomian di Desa Sitirejo banyak di dominasi dari sektor pertanian, jasa, buruh dan perdagangan. Terlihat dari hasil survei penduduk yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 764 orang terdiri dari baik pemilik, petani penggarap, buruh tani dan sebagainya. Sedangkan penduduk yang bekerja di bidang jasa (angkutan, ketrampilan, pelayanan hukum, persewaan) dan jasa yang lainnya berjumlah 177 orang. Sedangkan yang berprofesi sebagai buruh sebanyak 1.231 orang. Pedagang yang berjumlah 66 orang merupakan pelaku ekonomi di desa Sitirejo yang menjual pracangan, makanan, minuman, melijo, alat tulis, dan bahan bangunan.

Tabel 6. Status Mata Pencaharian Penduduk Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2010

No	Jenis pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani pemilik	186
2	Petani penggarap	150
3	Buruh tani	428
4	Perangkat desa	14
5	PNS, pensiunan PNS dan Pegawai BUMN/BUMD	154
6	Pegawai swasta	5
7	Pedagang	66
8	Jasa angkutan dan transportasi	30
9	Jasa pelayanan hukum (pengacara)	1
10	Jasa persewaan	3
11	Jasa ketrampilan (tukang)	143
12	Buruh industri	1.231
	Jumlah	2.411

Sumber : Profil Desa Sitirejo 2010

Jumlah penduduk desa Sitirejo yang saat ini berjumlah 8207 orang/jiwa dengan jumlah orang yang telah bekerja di berbagai bidang sebanyak 2.411 orang, maka di desa Sitirejo masih terdapat pengangguran.

Jumlah pengangguran usia produktif di desa Sitirejo berdasarkan penduduk usia 15 tahun sampai dengan 55 tahun sebanyak 1.501 orang dari angkatan kerja usia 15 – 55 tahun sebanyak 5004. Ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran pada usia produktif masih cukup tinggi di desa Sitirejo (Profil desa Sitirejo 2010).

d. Organisasi Desa

Kelembagaan/organisasi Desa Sitirejo dapat dibagi menjadi 2 yaitu organisasi pemerintah (formal) dan organisasi non pemerintah (non formal). Organisasi formal, dicirikan dengan organisasi pemerintah yang dikepalai oleh kepala desa dibantu dengan perangkat-perangkat desa lainnya, antara lain Ketua RW dan Ketua RT. Selain adanya perangkat desa, dalam kehidupannya, secara tidak langsung masyarakat juga hormat dan tunduk kepada tetua-tetua desa yang merupakan beberapa diantaranya merupakan keturunan dari pepunden yang membuka desa tersebut. Sedangkan organisasi non formal (non pemerintah) di Desa Sitirejo terbentuk dengan adanya kelompok-kelompok pengajian Ibu-ibu, kelompok tahlilan Bapak-Bapak, kelompok arisan Bapak/Ibu. Dengan adanya kelompok-kelompok yang terbentuk secara informal ini membawa pengaruh terhadap keerat-guyuban warga, termasuk di dalamnya dalam tradisi gotong royong di berbagai kegiatan, termasuk di antaranya kegiatan punya hajat.

Organisasi yang ada didesa Sitirejo diantaranya :

- 1) BPD
- 2) Pemerintah desa
- 3) RT/RW
- 4) PKK
- 5) Posyandu
- 6) Kelompok Tani
- 7) Jama'ah Tahlil/Tiba'
- 8) Pengurus pasar
- 9) Koperasi Warga
- 10) Karang Taruna
- 11) BKM
- 12) LPMD

3. Potensi Desa

a. Sumber Daya Alam

Kondisi lingkungan Desa Sitirejo merupakan daerah subur yang banyak digunakan sebagai lahan persawahan, ladang dan perumahan. Daerah tersebut menjadi subur karena dipengaruhi oleh curah hujan yang baik, penyinaran yang cukup, dan juga dilalui oleh aliran sungai metro yang cukup deras serta kondisi tanah (yang berupa pasir dan tanah liat) yang membuat tanah pertanian dan lahan tegalan yang ada di Desa Sitirejo dengan mudah menyerap air sehingga menjadikan lahan tersebut menjadi subur. Selain faktor alam yang membuat tanah di Desa Sitirejo menjadi subur, penduduknya pun memiliki peranan dalam mengelola lahan-lahan yang ada agar tidak sia-sia.

b. Sarana dan Prasarana yang Tersedia

Desa Sitirejo memiliki sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian, pendidikan, ekonomi, kesehatan demi kelanjutan hidup yang lebih baik diantaranya di bidang pendidikan yakni adanya bangunan sekolah-sekolah TK, SD, SMP serta yayasan keagamaan yakni adanya pondok pesantren dan majelis taklim, dan posyandu bagi balita-balita yang secara rutin dilaksanakan setiap bulannya.

Sarana prasarana yang menyangkut lingkungan diantaranya jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi, lampu penerangan jalan, dan sebagainya baik yang dibangun sendiri dari warga dengan keswadayaannya maupun yang dibangun dengan mendapat bantuan dari pemerintah.

c. Potensi Ekonomi Desa

Potensi ekonomi desa yaitu adanya pasar desa serta pabrik/industri-industri kecil yang berdiri di desa sebagai penunjang ekonomi warga.

B. Penyajian Data

1. Dukungan Organisasi kemasyarakatan setempat terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat di Desa Sitirejo

a. Program Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu prasyarat bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat untuk mencapai kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik dan tentunya juga diikuti dengan peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Program ini juga yang menjadi prioritas

pembangunan desa Sitirejo Kecamatan Wagir Malang seperti yang dikemukakan kepala desa Sitirejo yang mengatakan :

“Program pembangunan yang dilaksanakan di desa Sitirejo semuanya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Sitirejo. Program-program yang kita laksanakan antara lain pengembangan ekonomi kerakyatan misalnya KUD, Simpan Pinjam Perempuan yang dananya dari PNPM; pengembangan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur desa yang sekarang sedang dibangun yaitu jembatan penghubung antar desa serta pertanian dan peternakan yaitu adanya bantuan instalasi biogas, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.” (Wawancara 12 Maret 2011)



Gambar 3.
Balai Desa Sitirejo



Gambar 4.
Wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Umum Desa Sitirejo
di Balai Desa Sitirejo

Berikut ini program-program yang dilakukan :

1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi pedesaan sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pembangunan ekonomi pedesaan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Program prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga.
- b. Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani dan peternak.
- c. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa.
- d. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil pedesaan

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian prioritas program pengembangan ekonomi kerakyatan desa Sitirejo meliputi:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga yang dikembangkan Simpan Pinjam Perempuan dengan sumber pendanaan dari PNPM.



Gambar 5.
Kegiatan simpan pinjam perempuan di desa Sitirejo

- b. Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani dan peternak.



Gambar 6.
Kegiatan pertanian di desa Sitirejo

- c. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa. dengan adanya KUD yang menyediakan sarana produksi pertanian bagi petani.



Gambar 7.

Kegiatan KUD desa Sitirejo dalam distribusi pupuk pada petani

- d. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil pedesaan, dengan mengikut sertakan pengusaha-pengusaha desa untuk ikut pelatihan-pelatihan

Program pengembangan ekonomi kerakyatan ini di perkuat oleh pernyataan

Bapak Arwani Kepala Desa Sitirejo :

“Program pengembangan ekonomi kerakyatan seperti adanya simpan pinjam perempuan yang dananya didukung dari PNPM, dimana pelaksanaannya murni dilakukan perempuan (ibu-ibu) dan dikelola oleh para ibu itu sendiri. Yang lainnya adalah adanya KUD yang menyediakan saprodi bagi petani dan ikut juga menjualkan hasil-hasil pertaniannya petani.” (Wawancara 12 Maret 2011)

2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Saat ini, peranan SDM lebih menonjol dibandingkan dengan modal fisik dalam proses pembangunan ekonomi.

Program untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia wilayah perdesaan diprioritaskan pada:

- a. Program pengembangan pendidikan
- b. Program peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga
- d. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- e. Pembinaan kehidupan beragama
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat

Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa Sitirejo berdasarkan observasi di lapang tampak dari adanya sarana pendidikan yang memadai, kegiatan posyandu dalam upaya menjaga kesehatan anak sehingga kualitas generasi penerus dapat terjamin, adanya kegiatan rutin PKK. Dalam upaya pembinaan generasi muda terdapat fasilitasi lapangan olahraga, peralatan seni. Kehidupan beragama di Sitirejo juga terlihat dari adanya tahlilan setiap malam jum'at, dan di masjid-masjid tumbuh TPA-TPA untuk anak-anak belajar mengaji.



Gambar 8.
Sarana Pendidikan di Desa Sitirejo



Gambar 9.
Kegiatan Posyandu desa Sitirejo di balai desa Sitirejo



Gambar 10.
Pertemuan rutin PKK desa Sitirejo di balai desa Sitirejo



Gambar 11.
TPA desa Sitirejo

Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa Sitirejo juga seperti yang disampaikan Bapak Arwani Kepala Desa Sitirejo :

“Pengembangan SDM terus kita lakukan, baik itu di bidang pendidikan dengan terus mendorong wajib belajar masyarakat di pelosok-pelosok desa Sitirejo maupun kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan menggalakan posyandu. Pengembangan SDM perempuan kita sudah ada PKK yang sudah berjalan lama. Sedangkan pembinaan generasi muda kita fasilitasi dengan tempat-tempat untuk berkreasi seperti lapangan olahraga, peralatan seni yang ada di balai desa ini. Untuk pembinaan kehidupan beragama, di Sitirejo ini rutin adanya tahlilan setiap malam jum’at, dan di masjid-masjid setiap sore anak-anak belajar mengaji” (Wawancara 12 Maret 2011)

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.

Program yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur wilayah desa Sitirejo adalah:

- a. Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan atau jembatan perdesaan seperti yang diutarakan Bapak Arwani :

“Pembangunan jembatan yang membelah desa di desain cukup lebar dan kokoh. sehingga akses antar wilayah desa menjadi lebih mudah. Dana pembangunan jembatan sebagian besar iuran dari warga dan sebagian dari PNPM. Warga bahu membahu mengumpulkan dana sekaligus tenaga agar jembatan itu dapat segera selesai” (Wawancara 12 Maret 2011).



Gambar 12.
Pembangunan jembatan yang membelah desa

b. Pembangunan prasarana perekonomian, pertanian dan peternakan

Tahun 2011 telah dibangun percontohan 1 unit instalasi biogas di desa Sitirejo dan usaha kemitraan dengan anggota masyarakat di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir, dengan biaya kemitraan bisa mencapai Rp 2,5 juta sampai dengan Rp 3 juta untuk satu instalasi yang dapat digunakan tiga rumah tangga.



Reaktor Biogas

Penampung Biogas

Drum Umpan

Pengaman Gas

Kompor Biogas

Gambar 13
Instalasi Biogas di desa Sitirejo

Tujuan program ini menurut kata Renung, mantan Kasi Perencanaan dan Pengawasan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.

“Tujuan pembangunan instalasi biogas diperuntukan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga bisa dapat membantu perekonomiannya. Hal ini bisa dalam bentuk kemitraan masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Setiap warga yang ingin dibangun lokasi biogas harus menyediakan lahan/tanah kosong minimal 6,5 meter x 1,5 meter. “Bisa memiliki ternak sapi sendiri atau tetangganya yang dititipkan untuk dikandangkan di tempatnya paling sedikit tiga ekor sapi, ini akan menghasilkan biogas untuk dua tungku atau kompor gas,” yang dapat digunakan selama 4-5 jam sehari”. (Wawancara 18 Maret 2011)

4. Pelestarian dan Pengembangan nilai-nilai budaya lokal.

Berikut ini Pelestarian dan Pengembangan budaya lokal seperti yang disampaikan Bapak Arwani Kepala Desa Sitirejo :

“Pelestarian budaya lokal yang ada di desa Sitirejo masih berjalan dengan baik, seperti gamelan yang ada di balai desa ini masih rutin di pakai oleh kelompok gamelan desa. Tahlilan setiap malam jum’at, majelis taklim di masjid-masjid. Sinoman bila ada acara hajatan warga, bahkan bersih deso dan slamaten deso pun masih kita lakukan setiap tahunnya” (Wawancara 12 Maret 2011)

b. Program Pemberdayaan Desa

1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa sangat terkait dengan peran perempuan. Keputusan pemerintah untuk merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam federasi mengakibatkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen. Organisasi ini

bermula dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berupaya melibatkan partisipasi dan merupakan program pendidikan perempuan. Selanjutnya organisasi ini berubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang berupaya tidak hanya mendidik perempuan, melainkan membina dan membangun keluarga di bidang mental spiritual dan fisik material serta peningkatan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Bergulirnya reformasi dan disyahkannya GBHN 1999 oleh MPR serta adanya paradigma baru pembangunan dan semangat otonomi daerah, maka kepanjangan PKK berubah menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

PKK yang merekrut anggota sampai lapisan bawah masyarakat diharapkan mampu membawa pada kondisi keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang berdaya yaitu keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarkhi, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan. Namun, pada kenyataannya PKK belum sepenuhnya mampu merubah kondisi keluarga dan perempuan, sehingga belum terwujud kesetaraan dan keadilan gender.

Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa Sitirejo berada pada kewenangan Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang melaksanakan tugas pokok pengelolaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. penyiapan kebijakan teknis dan strategi operasional pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. penyiapan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- d. penyiapan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. penyiapan upaya-upaya strategis kebijakan pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Program kegiatan PKK desa Sitirejo seperti yang disampaikan ketua PKK desa Sitirejo:

Kegiatan PKK yang rutin adalah mengumpulkan data warga; ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat. PKK juga memberi pemahaman terhadap penggunaan alat

kontrasepsi termasuk pemahaman agama, mereka juga harus memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat program KB kepada masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah, mereka membantu korban kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. PKK juga membantu kaum miskin yang kelaparan dengan cara membantu ekonomi kaum perempuan. Program kerja PKK berorientasi pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. (Wawancara 12 Maret 2011)

Dalam programnya, PKK desa Sitirejo memiliki 10 (sepuluh) program sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga baik sosial maupun ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombaknya. 10 program Pokok PKK yaitu :

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

Dengan adanya 10 program PKK ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dari adanya pemberdayaan yang dilakukan warga desa Sitirejo.

2) Program Pembangunan PNPM

Dari sedikit program pemerintah yang berjalan konsisten dan tumbuh, terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Program ini, untuk menanggulangi kemiskinan. PNPM tumbuh dari

kegiatan berbasis partisipasi masyarakat yang sudah ada sejak awal reformasi dan kini berkembang ke berbagai bentuk program pedesaan-perkotaan, sektoral (perikanan, pertanian, kredit usaha kecil), hingga pembangunan sosial ekonomi wilayah.

Program pembangunan yang dibiayai oleh PNPM di desa Sitirejo Kecamatan Wagir untuk pembangunan prasarana adalah jembatan penghubung antar desa, sedangkan untuk menunjang dan memberdayakan ekonomi masyarakat program yang dijalankan adalah simpan pinjam perempuan.

Prasarana/sarana di Desa Sitirejo memiliki mutu konstruksi yang cukup baik karena dikerjakan secara gotong royong dengan masyarakat desa. Desa Sitirejo juga memiliki tim pengelola yang berfungsi dengan baik, ada iuran pemeliharaan, sehingga pemeliharaan/perawatan prasarana/sarana. Untuk menjamin pelestarian prasarana/sarana yang sudah dibangun, menjamin umur konstruksi yang lebih panjang, serta menjamin tersedianya pelayanan masyarakat.

3) Pelaku Pemberdayaan Masyarakat

Pelaku pemberdayaan perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar dapat melakukan pendampingan secara baik. Pelaku pemberdaya yang potensial adalah organ pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal, yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat miskin dan terbelakang. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan menuntut pola kerja yang fleksibel, tidak terhambat oleh sistem administrasi

penganggaran yang ketat. Agar pelaku pemberdaya masyarakat dapat bekerja secara profesional, maka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Pelaku pemberdayaan di desa Sitirejo kecamatan Wagir adalah fasilitator P2KP yang dibiayai oleh pemerintah. Fasilitator-fasilitator ini sebelum terjun ke masyarakat telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang intensif dalam upaya meningkatkan kemampuan mereka.

2. Dukungan budaya setempat dalam implementasi program Pemberdayaan masyarakat di Desa Sitirejo

a. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo

Kehidupan masyarakat kampung di Jawa Timur khususnya desa Sitirejo Malang tanpa pernah disadari oleh banyak peneliti ternyata menyimpan aktivitas-aktivitas unik yang telah menjadi tradisi. Salah satunya yaitu Sinoman.

Sinoman menurut Arwani Kepala desa Sitirejo :

“Sinoman memiliki pengertian *sing para nom-noman* atau para pemuda yang memiliki tujuan kebersamaan dan kegotongroyongan membantu sesama. Sinoman ini memiliki kegiatan membantu warga yang tertimpa musibah seperti kematian ataupun warga yang memiliki hajatan dengan menjadi *peladen* atau pelayan dan sekaligus meminjamkan alat-alatnya seperti keranda jenazah, gelas, piring, kursi, meja, tenda dan sebagainya. Kegiatan lain Sinoman adalah penjagaan keamanan kampung atau pos ronda, acara keagamaan, peringatan hari kemerdekaan Indonesia, kursus-kursus peningkatan kapasitas warga kampung”. (Wawancara 12 Maret 2011)

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Dainullah Kaur umum desa Sitirejo :

"Nyinom", istilah untuk melakukan pekerjaan sinom dilakukan umumnya oleh pemuda-pemudi di suatu perkampungan. Biasanya keluarga yg mempunyai hajat alias ewuh meminta tolong pada para

pemuda untuk menjadi pelayan tamu. Begitu perhatiannya orang Jawa dalam menyambut dan melayani tamu, sampai-sampai segalanya dipersiapkan secara detail. Bukan menyusahkan diri tapi mengusahakan "ngajeni" tamu sehingga mereka merasa benar-benar dimuliakan dan dilayani. (Wawancara 12 Maret 2011)

Tradisi *sinoman* dilakukan para warga pria/bapak-bapak maupun warga wanita/ibu-ibu. Pelaku *sinoman* secara umum adalah saudara suami dan istri meliputi saudara kandung, bapak dan ibu, keponakan, *misanan* dan *mindooan*. Selain itu tetangga ataupun sahabat juga menjadi peserta *sinoman*.

Anggota *sinoman* adalah para anak muda kampung tersebut yang merasa bahwa sikap saling tolong menolong untuk memperingan beban warga yang sedang mengadakan kegiatan. Selain itu sikap saling tolong menolong dan kebersamaan akan mengurangi tingkat kekacauan yang ada di kampung.

b. Peranan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Sinoman

Tradisi *sinoman* merupakan kegiatan membantu tetangga ataupun kerabat pada saat tetangga ataupun kerabat memiliki hajat, baik hajat pernikahan, ataupun khitanan. Kegiatan *sinoman* dimulai beberapa hari sebelum acara dilangsungkan, Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri pada kegiatan *sinoman*. *Sinoman* dilaksanakan mulai H-3 yang biasa disebut *biyodo*, biasanya dilakukan oleh ibu-ibu, sedangkan *sinoman* dimulai dari H-2 yang biasanya dilakukan para muda-mudi .

Adapun kegiatan *sinoman* sebagai berikut :

1. *Sinoman* pada hari H-2: membuat *terop*, *sarongan*; membuat landasan untuk jenang (pawonan); dilanjutkan dengan membuat *jenang*; setelah selesai jenang, pawonan langsung dibongkar; membuat *keropak* (kotak makanan dan kotak kue) peran ini dilakukan oleh laki-laki.

Berikut adalah gambar *pawonan* untuk *njenang*:



Gambar 13.

Area *sinoman* yang di dalamnya juga terdapat *pawonan* untuk *njenang*

2. *Sinoman* pada hari H-1: menyediakan perlengkapan meja, kursi, taplak meja, menutupi *terop* dengan kain keliling dan juga plafon; laki-laki yang tidak ikut mengerjakan *terop*, membantu kegiatan ibu-ibu di dapur seperti mengangkat-angkat barang/bahan masakan; mengarahkan tetangga atau saudara ke dapur; membantu melengkapi kayu, dan malam hari acara *melekan*.



Gambar 14.

Para pemuda yang sedang memasang *terop* dan menata meja pada kegiatan *Sinoman*



Gambar 15.

Para pemuda dan ibu-ibu memasak didapur pada kegiatan Sinoman H-1

3. *Sinoman* pada hari H: melakukan persiapan; melayani tamu; membersihkan lokasi.

Berikut adalah gambar muda-mudi yang siap melayani tamu pada hari H



Gambar 16.

Kegiatan sinoman muda-mudi yang siap melayani tamu pada hari H

Peranan pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan sinoman diatas seperti disampaikan oleh Bapak Saturi yang mengatakan bahwa :

“Sinoman dilakukan pada H-2 mulai dari persiapan menata tempat memasak dan menata ruang sampai melayani tamu pada hari H. Laki-laki membuat *terop*, *sarongan*; membuat landasan untuk jenang, dilanjutkan dengan membuat *jenang*; setelah selesai jenang, pawonan langsung dibongkar; membuat *keropak*. Sedangkan wanita mempersiapkan masakan di dapur” (Wawancara 16 Maret 2011)

c. **Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Peranan Budaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitirejo**

1) **Faktor-Faktor Pendukung**

a) **Faktor Internal**

Faktor internal yang mendukung peranan budaya seperti sinoman sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di desa Sitirejo adalah pada wilayah-wilayah pelosok desa Sitirejo kehidupan desa masih terasa kental, tradisi sinoman masih banyak ditemui terutama pada saat ada warga yang punya hajat. Kondisi ini seperti disampaikan oleh salah satu warga Desa Sitirejo Bapak Saturi :

”Sebagian wilayah desa Sitirejo terutama yang pelosok, kehidupan desa masih sangat kental, sehingga kegiatan-kegiatan sinoman masih sering ditemui di warga yang sedang punya hajat”
(Wawancara 16 Maret 2011)

b) **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang mendukung peranan sinoman sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di desa Sitirejo adalah sinoman merupakan tradisi budaya jawa yang cukup lama dan sudah diturunkan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Karena sudah menjadi suatu budaya, maka keberadaan sinoman tetap akan langgeng meskipun terjadi perubahan-perubahan bentuk sinoman. Senyampang masih di Jawa, kegiatan sinoman mudah dijumpai. Faktor ini memperkuat eksistensi sinoman sebagai budaya terutama didesa Sitirejo.

Faktor lain adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk melestarikan budaya lokal yang sudah ada di wilayahnya untuk tetap dijaga. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Desa Sitirejo :

”Pemerintah desa sangat mendukung keberadaan sinoman sebagai budaya lokal yang penuh akan nilai-nilai kegotong royongan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya pemberdayaan, dengan kegotong royongan ini beban berat yang ada di masyarakat akan mudah diatasi. Dan tidak hanya itu sifat kegotongroyongan ini akan mempermudah kami untuk menjalankan program-program yang telah kami canangkan” (Wawancara 12 Maret 2011)

2) Faktor-Faktor Penghambat

a) Faktor Internal

Keberadaan kaum pemuda dan perempuan dalam kegiatan desa juga membawa warna baru dalam kehidupan pembangunan sosial desa. Dengan semakin tinggi tuntutan kehidupan dan semakin sempit pekerjaan di desa akibat lahan pertanian yang semakin lama berkurang karena pertumbuhan perumahan-perumahan di wilayah Sitirejo, maka kaum muda desa Sitirejo mencari pekerjaan di kota yang memang lebih menjanjikan, apalagi di tunjang dengan dekatnya perjalanan ke kota Malang.

Faktor yang menghambat peranan sinoman seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sitirejo :

“Tradisi sinoman saat ini lebih banyak didominasi oleh kaum ibu-ibu dan bapak-bapak, karena anak-anak muda di desa ini banyak yang ke kota, sebagian bekerja di kota, sebagian melanjutkan pendidikan di kota. Di desa sulit untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan anak petani pun juga pergi ke kota akibat lahan-lahan di desa ini banyak yang sudah menjadi perumahan”. (Wawancara 12 Maret 2011)

b) Faktor Eksternal

Letak Desa Sitirejo yang berada diantara Kecamatan Wagir dengan Kota Malang tentu membuat pola kehidupan kota serta

problematicanya mulai dirasakan oleh warga Desa Sitirejo. Kehidupan kota yang gemerlapan, serta didukung jarak dari desa Sitirejo yang dapat ditempuh hanya 20 menit membuat kaum muda terpengaruh kehidupan di kota yang modern, akibatnya perlahan-lahan mulai meninggalkan tradisi-tradisi di desa salah satunya tradisi sinoman. Kaum muda melakukan sinoman hanya pada hari H nya.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap keberadaan sinoman adalah adanya kegiatan bisnis dan terjadinya industrialisasi yang masuk ke wilayah desa Sitirejo yang tidak dapat dielakkan. Bermunculannya pabrik-pabrik besar sebagai bagian industrialisasi serta banyaknya perumahan-perumahan yang dibangun pihak pengembang mendatangkan begitu banyak pendatang yang bertempat tinggal di Sitirejo juga merupakan faktor penghambat peran sinoman. Hal ini seperti disampaikan oleh aparat desa Sitirejo :

“lingkungan RW 1, RW 2, RW 4 dan RW 5 berada pada daerah perumahan, umumnya mereka pendatang yang mayoritas tingkat kehidupannya relatif lebih baik. Mereka umumnya orang-orang sibuk yang suka praktisnya saja. Ketika ada hajatan mereka datang dan menyumbang, begitu pula yang punya hajatan cukup menyewa terop lengkap dengan soundnya, dan masakannya pun mereka tinggal pesan. Sehingga tradisi sinoman di wilayah ini jarang ada.” (Wawancara 12 Maret 2011)

3. Pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat di Desa Sitirejo

Kegiatan budaya, memang bukan hanya karya seni. Budaya juga aktivitas sehari-hari sejak janin dalam rahim, lahir, hidup sampai kembali ke alam baqa. Salah satu budaya desa Sitirejo yang berpadu dengan budaya global itu adalah tradisi gotong-royong yang disebut Sinoman. Sinoman, layak

diungkap dan disajikan sebagai sebuah kajian ragam budaya nasional. Bagaimanapun juga, budaya Sinoman dari Sitirejo ini mulai terpengaruh dan bergeser akibat budaya modern dan bisnis dari adanya perkembangan kota Malang yang sangat cepat.

Tradisi sinoman di desa Sitirejo juga digunakan oleh organisasi karang taruna untuk memberdayakan dirinya dan lingkungan masyarakat sekitar, hal ini seperti diungkap oleh pengurus karang taruna desa Sitirejo :

“Sebagai wadah yang telah terbentuk di lingkungan masyarakat, karang taruna kami membentuk team untuk koordinir masalah sinoman, selain sebagai kegiatan sosial di masyarakat juga bertujuan untuk melestarikan budaya yang telah ada secara turun temurun juga untuk membina pemuda dan pemudi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik dalam suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.” (Wawancara 16 Maret 2011)

Pengaruh tradisi sinoman juga mengikuti karakteristik sosial budaya masyarakat desa Sitirejo yang dapat ditinjau dari 4 sudut pandang yaitu; 1) sistem kelembagaan, 2) sistem kemasyarakatan atau kekerabatan, 3) kehidupan ekonomi, 4) kehidupan budaya dan religi.

1). Sistem kelembagaan

Sistem kelembagaan Desa Sitirejo mengikuti dengan susunan kelembagaan dari pemerintah, yaitu dikepalai oleh Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat-perangkat desa lainnya, antara lain Ketua RW dan Ketua RT. Selain adanya perangkat desa, dalam kehidupannya, secara tidak langsung masyarakat juga hormat dan tunduk kepada tetua-tetua desa yang merupakan beberapa diantaranya merupakan keturunan dari pepunden yang membuka desa tersebut. Selain itu, lembaga-lembaga informal lain yang ada pada Desa Sitirejo ini terbentuk dengan adanya

kelompok-kelompok pengajian Ibu-ibu, kelompok tahlilan Bapak-Bapak, kelompok arisan Bapak/Ibu, PKK. Dengan adanya kelompok-kelompok yang terbentuk secara informal ini membawa pengaruh terhadap keerat-guyuban warga, termasuk di dalamnya dalam tradisi gotong royong di berbagai kegiatan, termasuk di antaranya kegiatan punya hajat.

2) Sistem kemasyarakatan/kekerabatan

Sebagian besar warga memiliki hubungan kekerabatan, sehingga pada pemukimannya terdapat beberapa kelompok rumah yang berdekatan yang memiliki ikatan kekerabatan. Warga desa Sitirejo tidak memegang secara khusus sistem kekerabatan matrilinear atau patrilinear. Akan tetapi berdasar kesepakatan non lisan ataupun tulisan, warga seolah menyepakati bahwa yang akan tinggal bersama ataupun memiliki rumah terdekat dengan orang tua adalah anak terakhir, baik anak tersebut perempuan ataupun lelaki.

3) Kehidupan ekonomi

Desa Sitirejo merupakan daerah yang terletak di area perbukitan dan letaknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota Malang. Kondisi tanahnya cukup subur dengan kontur yang cukup datar di area pemukiman. Kondisi tanah yang cukup subur ini membuat beberapa warga memilih untuk menanam padi di daerah persawahan yang irigasinya baik, dan berkebun didaerah tegalan antara lain kebun jeruk, durian, alpukat, dan sebagainya. Selain berkebun, warga juga sebagian besar bermata pencaharian sebagai tukang. Mata pencaharian lainnya yang tidak terlalu banyak jumlahnya adalah sebagai pedagang, peternak, dan lainnya. Untuk

para wanita, sebagian besar merupakan ibu rumah tangga, akan tetapi juga terdapat wanita yang bekerja, yaitu sebagai buruh pabrik, berkebun, ataupun membuka usaha peracangan di depan rumah mereka masing-masing. Kehidupan ekonomi yang sangat erat dengan alam menumbuhkan nilai-nilai kegotong royongan dan saling menolong diantara mereka.

4) Kehidupan budaya dan religi

Masyarakat desa Sitirejo hampir seluruhnya beragama Islam, dengan kehidupan kesehariannya yang masih cukup menempel karakter budaya kejawen. Banyak tradisi-tradisi dilakukan warga berdasarkan dengan kepercayaan-kepercayaan Jawa, beberapa diantaranya adalah tradisi *Bersih Deso*, *Slametan Deso*, *Malem Jumat Legi*, *Mitonan*, *Sayan*, *Sinoman* dan *Biyodo*, dan sebagainya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Program-program pemerintah yang bernuansa pemberdayaan telah banyak diluncurkan. Beberapa diantaranya dinilai gagal memberdayakan dan memandirikan masyarakat, dan malah memperdaya masyarakat dengan menimbulkan dampak sebaliknya, menimbulkan ketergantungan, merusak kearifan lokal, dan merusak modal sosial masyarakat.

Suatu program dilaksanakan adalah untuk membentuk hubungan yang memungkinkan tujuan dan sasaran program tersebut dapat diwujudkan sebagai hasil akhir (*outcomes*) suatu kegiatan. Pengalaman empirik banyak menunjukkan bahwa fakta sebuah kebijakan/program tidak dapat dilaksanakan secara efektif dalam proses pelaksanaannya atau maupun dari sisi pencapaian tujuan atau

sasarannya. Hal ini dapat terjadi baik karena pelaksanaannya yang jelek, atau karena programnya yang jelek. Dalam kaitannya dengan program pemberdayaan, kegagalan dapat terjadi karena proses pelaksanaan program tersebut yang tidak memberdayakan dan memperhatikan organisasi sosial dan budaya setempat sehingga program tersebut tidak menyentuh akar problematik pemberdayaan itu sendiri.

Melalui proses penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui dukungan organisasi dan budaya yang ada dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian seperti yang diuraikan sebelumnya, selanjutnya penulis bahas dan kaji melalui teori-teori dan dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Berikut ini adalah hasil paparan penelitian dengan pembahasan yang disesuaikan dengan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Setempat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat.

Kebijakan program Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan kebijakan Pemerintah terhadap pembangunan desa sebagai upaya untuk mendukung peningkatan sarana pelayanan masyarakat di tingkat desa. Konsep yang diterapkan adalah Pembangunan Desa melalui Pemberdayaan Swadaya Masyarakat memberikan arah baru dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan desa, sasaran dari sistem ini adalah dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengacu sistem pembangunan yang berpusat pada rakyat, maka akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya menggali sebesar-besarnya kemampuan masyarakat lokal sebagai eksistensi dari

nilai pemberdayaan terhadap mereka. Korten dan Sjahrir (1987 : 261) mengungkapkan bahwa konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat cukup sederhana. Konsep ini merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa seharusnya yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan yang bersumber atas inisiatif masyarakat, hal ini tidak berarti menafikan bantuan-bantuan dari luar, sepanjang bantuan tersebut bersifat *technical assistantcy* yang keberadaannya berdampak pada peningkatan inisiatif dan partisipasi masyarakat, atau bersifat stimulan untuk merangsang bangkitnya tingkat keswadayaan dari masyarakat desa, untuk itu semestinyalah pemberdayaan masyarakat pedesaan juga menjadi perhatian yang utama.

Pemberdayaan dapat berarti keterlibatan institusi lokal secara berkesinambungan dan konsisten dengan memberi peluang terhadap partisipasi masyarakat melalui dukungan organisasi masyarakat dan budaya setempat dalam setiap tahapan kebijakan dalam upaya mewujudkan otonomi lokal, termasuk dalam hal ini otonomi desa. Dukungan masyarakat atau massa berarti sekelompok orang yaitu bagian dari rakyat yang sudah sadar politik, sadar akan ketertindasannya serta keharusan untuk melawan. Berdasarkan pemahaman dukungan kelompok tersebut maka Arbi Sanit (1986) juga mengutip pendapat Arthur F. Bantley tentang suatu kelompok yaitu:

“... diartikan sebagai suatu perikatan manusia dari suatu masyarakat dapat dikenali, namun bukan sebagai suatu kumpulan massa yang secara fisik

terbedakan dengan kumpulan-kumpulan massa lainnya, akan tetapi merupakan suatu aktivitas dari sekumpulan orang banyak yang tidak menafikan orang-orang yang berpartisipasi di dalam aktivitas tersebut untuk mengambil bagian di dalam berbagai kegiatan kelompok lainnya.”

Dalam kondisi masyarakat yang pernah mengalami keterbelakangan, kreatifitas dan partisipasi masyarakat sering kali memerlukan dorongan dari penguasa untuk bisa bergerak, sebagaimana diungkapkan oleh Ndraha (1990) bahwa prakarsa (*inisiative*) dan partisipasi sebagai salah satu elemen dalam proses pembangunan desa perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Pihak lain tersebut yang mengambil prakarsa dan masyarakat diminta atau diberi kesempatan untuk turut serta.

Senada dengan ungkapan tersebut, Tjokroamidjojo (2002) mengatakan bahwa pembangunan adalah upaya suatu masyarakat atau bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat atau bangsa itu. Namun demikian yang perlu dihindari adalah upaya pengkondisian kegiatan yang bersifat memaksakan kemauan kepada masyarakat desa untuk kemudian diakui itu sebagai partisipasi, ini sering bermuara dari tingginya nuansa politik yang melingkupi sebuah program.

Walaupun keterlibatan pemerintah dipandang perlu dalam implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, namun keterlibatan dalam pengaturan yang berlebihan justru akan mematikan kreatifitas masyarakat dan pada akhirnya akan dapat mengaburkan makna dari partisipasi. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap tingkat kemampuan dan kemandiriannya akan menuntut untuk mau melepaskan diri dari belenggu kekuasaan yang berlebihan, untuk itu perpaduan starategi *top down* dan *bottom up* menjadi sangat penting. Oleh

karenanya pendekatan untuk peningkatan peran aktif masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan yang dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya terhadap inisiatif dan prakarsa masyarakat sangat perlu dikembangkan dan dibina secara terus menerus dengan upaya yang sungguh-sungguh. Dengan demikian diharapkan sikap apatisme masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat terhindarkan.

Sementara dengan strategi *top down* dan *bottom up* ini diharapkan tercipta beberapa kebaikan seperti diungkapkan oleh Brant dan White (1989) yakni :

1. Melalui strategi ini masyarakat dapat memberikan tanggapan, jawaban atau *feed back* kepada pihak atas mengenai hal-hal yang menyangkut jawaban, tanggapan, laporan dan *feed back*. *Feed back* baik positif maupun negatif amat penting. Jika warga desa tidak bebas menyatakan pendapatnya mengenai suatu hal yang menyangkut usaha perbaikan atau kegiatan sosial, yang bersangkutan telah kehilangan daya lindung atau pertahanannya selaku anggota masyarakat.
2. Melalui mekanisme dari bawah keatas, masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutan kepada pemerintah.
3. Melalui strategi *top down* dan *bottom up* dapat terjadi tawar menawar, pemufakatan atau kompromi
4. Dapat dilakukannya komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah.

Dengan adanya strategi tersebut, diharapkan sedikit demi sedikit juga akan berakibat kepada kurangnya sifat ketergantungan masyarakat desa kepada pemerintah, masyarakat diharapkan mampu menggali potensi desanya, terutama

dalam hal pembangunan sarana penunjang kegiatan pemerintahan desa. Namun strategi seperti ini masih mengalami kelemahan, ini dibuktikan dengan tidak maksimalnya rencana masyarakat yang semestinya tersalurkan melalui program tersebut, disamping itu juga terdapat kebutuhan program yang terpola dari atas, hal ini tentu berakibat pada pengurangan alokasi dana dari sektor lain yang sebenarnya justru menjadi aspirasi murni masyarakat desa. Untuk itu semestinya inisiatif kebijakan pembangunan yang diperlukan masyarakat adalah, sebuah kebijakan yang dapat berdampak secara langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat desa serta secara langsung pula bisa meningkatkan pendapatan asli desa sebagai modal pembangunan perdesaan, sehingga diharapkan akan memacu peningkatan kemandirian desa dalam membangun desanya. Berangkat dari situasi ini, diharapkan pemerintah desa tidak lagi menaruh harapan berlebihan kepada pihak luar dalam membangun desanya.

Seperti temuan yang didapatkan peneliti, bahwa bantuan/program pemberdayaan yang diterima desa Sitirejo melalui dukungan organisasi kemasyarakatan setempat memiliki dampak dalam memacu tingkat kemandirian desa, bantuan ini terlihat dari beberapa program yang diberikan pemerintah terhadap desa Sitirejo seperti ; pembangunan jembatan penghubung antar desa, instalasi biogas, dan simpan pinjam perempuan.

Program pembangunan jembatan penghubung antar desa memberi dampak dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian desa karena merupakan jalan yang menghubungkan masyarakat antar desa dan jalur distribusi hasil-hasil pertanian dan barang kebutuhan masyarakat desa. Dengan adanya jembatan

penghubung maka perekonomian masyarakat meningkat yang pada akhirnya perekonomian desa ikut meningkat.

Pembangunan instalasi biogas diberikan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk membantu meningkatkan perekonomiannya, dengan bantuan ini terjadi optimalisasi pemanfaatan limbah ternak dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Sedangkan program simpan pinjam perempuan yang dananya dari PNPM yang disalurkan pada kelompok PKK, mendorong produktivitas perempuan untuk melakukan usaha mandiri sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

Model pemberdayaan yang dipakai dalam program pemberdayaan masyarakat ini adalah model *community development* (pengembangan masyarakat). Model ini memiliki tujuan untuk membangkitkan semangat serta hasrat pembangunan dikalangan penduduk pedesaan, dan untuk mencetuskan gairah kerja agar dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan.

Konsep pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) dan pembangunan masyarakat merupakan awal dan aspirasi bagi munculnya strategi pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasi dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya. Hal tersebut dipertegas oleh Suhendra (2006) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep alternative pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih

partisipatif. Konsep tersebut berarti lebih menekankan pada peran serta masyarakat yang berkesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

Dalam kerangka pemikiran itu berbagai *input* seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok. *Pertama*, mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptable*); *kedua*, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); *ketiga*, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); *keempat*, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*);

dan *kelima*, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

Disisi lain keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga.

Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa Sitirejo adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan.

Oleh karena itu, sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai

peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkan kembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

PKK menjadi gerakan untuk mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat. PKK juga harus menembus pemahaman agama yang kurang tepat, tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi termasuk mereka harus memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat program KB kepada masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah, mereka membantu korban kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. PKK concern dalam membela kaum miskin yang kelaparan dengan cara membantu ekonomi kaum perempuan. Program kerja PKK berorientasi pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. Dan lebih dari itu, PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa.

Dalam programnya, PKK desa Sitirejo memiliki 10 (sepuluh) program sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga baik sosial maupun ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombaknya. 10 program Pokok PKK yaitu :

a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran keluarga dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dengan sosialisasi melalui penyuluhan, pelatihan dan simulasi terpadu.

Program ini sesuai dengan kebutuhan gender dapat dikategorikan menjadi kebutuhan praktis dimana harus segera dilaksanakan karena sifatnya mendesak, selain itu dapat juga dikategorikan menjadi kebutuhan gender strategis karena program ini bisa berdampak untuk jangka panjang, misalnya Pola Asuh Anak dan KADARKUM. Program ini sesuai dengan pendekatan kebijakan dalam bidang penguatan.

b) Gotong Royong

Dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong bertujuan untuk membangun kerjasama yang baik antar keluarga, warga, dan kelompok dalam rangka mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan. Program ini sesuai dengan kebutuhan gender yang bersifat praktis karena dengan adanya program gotong-royong ini, masyarakat dapat mempererat tali persaudaraan antara warga.

Selain termasuk dalam kebutuhan praktis, program ini juga termasuk dalam kebutuhan strategis karena dalam kegiatan gotong royong biasanya membangun fisik fasilitas desa. Maka dengan pembangunan fisik tersebut akan membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat lainnya. Contohnya adalah bakti sosial. Kegiatan bakti sosial dapat

mempererat tali persaudaraan antara masyarakat dengan warga lingkungan sekitar.

c) Pangan

Program ini difokuskan pada peranan majemuk perempuan dalam bidang produksi dan kemasyarakatan. Dengan adanya program pangan ini maka banyak warga yang dapat memproduksi makanan sendiri. Misalnya program TOGA (Tanaman Obat Keluarga) membuat warga memproduksi tanaman obat sendiri agar jika salah satu anggota ada yang sakit, bisa langsung diobati tanpa harus pergi ke rumah sakit. Program pangan bisa bersifat kemasyarakatan, misalnya pengadaan lomba masak secara berjenjang guna meningkatkan kreatifitas cipta makanan.

Program ini dapat memenuhi kebutuhan gender secara praktis karena dapat mengoptimalkan potensi warga dalam bidang pangan secara tepat guna. Selain itu, program ini juga memenuhi kebutuhan gender secara strategis karena program-program yang ada dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang, misalnya program TOGA yang bisa bermanfaat untuk waktu yang lama.

Pendekatan yang digunakan dalam program pangan ini adalah penguatan ekonomi dan anti kemiskinan. Warga yang ada di desa Sitirejo kebanyakan memproduksi barang yang bisa di pasarkan sebagai tambahan untuk perekonomian keluarga mereka.

d) Sandang

Program ini bertujuan untuk membudayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat

mencintai produksi dalam negeri. Pendekatan yang digunakan dalam program sandang ini adalah produksi dan kemasyarakatan. Dikategorikan ke dalam produksi karena dapat meningkatkan produksi dalam negeri (busana batik) yang kini sudah diakui oleh seluruh dunia bahwa batik adalah produk asli Indonesia. Program ini memenuhi kebutuhan gender praktis karena dapat mempromosikan budaya jawa lewat busana batik dan memenuhi kebutuhan gender strategis karena dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan.

Program ini menggunakan pendekatan anti kemiskinan dan penguatan ini terlihat dari penggunaan dan usaha penjualan batik.

e) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Dalam program perumahan dan tata laksana rumah tangga lebih cenderung pemfokusan peranan terhadap kemasyarakatan. Karena dengan adanya program ini, kebutuhan papan setiap warga akan terpenuhi, sehingga tidak ada lagi warga yang tidak memiliki rumah dan tempat tinggal.

Program inipun memenuhi kebutuhan praktis karena kebutuhan papan (rumah, tempat tinggal) merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh setiap warga atau kepala keluarga. Selain termasuk kedalam kebutuhan strategis, termasuk juga kedalam kebutuhan praktis, karena dengan dibangunnya rumah atau tempat tinggal, maka bisa menjadi warisan untuk anak-anak dan cucu-cucu di masa yang akan datang. Contoh kegiatan dari program ini adalah pemberdayaan rumah susun.

Program ini menggunakan pendekatan penguatan atau pemberdayaan karena dengan adanya program ini menjadikan kekuatan tersendiri bagi kehidupan rumah tangga. Selain itu, dengan kepemilikan rumah atau tempat

tinggal merupakan suatu penentuan status individu dalam kehidupan dalam kehidupan social kemasyarakatan sekaligus sebagai anti kemiskinan.

f) Pendidikan dan Keterampilan

Program ini difokuskan kepada peranan majemuk perempuan dalam bidang produktivitas, karena dengan adanya pendidikan dan keterampilan akan menghasilkan kader-kader atau bibit manusia yang baik untuk masa depan. Selain itu, program inipun membuat kesadaran akan pendidikan semakin meningkat.

Kebutuhan gender strategis dapat dilihat dari program ini bisa membawa dampak baik bagi kehidupan anak-anak dimasa depan. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, maka usaha untuk mendapatkan lapangan pekerjaan semakin besar. Selain itu kebutuhan gender praktis juga terdapat dalam program ini. Terlihat dari dengan adanya pelatihan keterampilan, akan membuat anak-anak menjadi paham tentang sesuatu dari sejak dini. Selain itu para perempuan yang ada dapat terberdayakan dengan baik sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing individu. Contoh kegiatan dari program ini adalah pelatihan keterampilan menjahit.

g) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal yang utama dalam kehidupan, maka dari itu sangat penting bagi setiap individu untuk menjaga kesehatan. Dalam program ini, akan memfokuskan peran wanita terhadap pemberdayaan, yaitu dengan tujuan memberdayakan keluarga dalam menunjang penurunan

angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, memperbaiki gizi bagi balita dan keluarga.

Fokus peran wanita dalam program ini adalah dalam hal reproduksi yaitu asupan gizi dan kualitas ASI. Kualitas ASI yang semakin baik, maka akan membuat anak menjadi sehat pula. Program ini juga termasuk dalam kebutuhan gender praktis yaitu dengan cara mengoptimalkan pelatihan, penyegaran, dan pembinaan kader posyandu. Selain termasuk kebutuhan gender praktis, termasuk pula kedalam kebutuhan gender strategis. Karena kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting sehingga harus selalu dijaga, maka masyarakat membuat posyandu.

Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan keadilan karena memperhatikan kesehatan keluarga tanpa membedakan derajat dan status social keluarga lain. Contoh kegiatan dari program ini adalah Posyandu, Imunisasi, dan lain-lain.

h) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Pada program ini, peranan majemuk perempuan lebih terfokus pada produktivitas, karena dengan adanya pengembangan hidup dalam berkoperasi bisa menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga rumah tangga. Kebutuhan gender praktis yang ada dihasilkan dari tambahan penghasilan melalui Simpanan Hasil Usaha (SHU) sebagai tambahan penghasilan keluarga.

Kebutuhan gender strategis bisa dilihat dari dengan mengikuti koperasi, maka keluarga memiliki tabungan atau simpanan yang dapat digunakan dimasa depan. Pendekatan yang dilakukan dalam program ini adalah penguatan ekonomi keluarga sekaligus anti kemiskinan karena adanya

tambahan pendapatan yang dihasilkan dengan mengikuti koperasi yang ada di desa.

i) Kelestarian Lingkungan Hidup

Program kelestarian lingkungan hidup termasuk dalam program kemasyarakatan, karena dengan adanya pelestarian lingkungan hidup maka warga telah ditanamkan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar pemukiman warga. Kebutuhan gender praktis lebih cenderung kepada kesehatan, karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi individu baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Kebutuhan gender dalam hal strategis adalah kebersihan lingkungan. Dengan warga yang selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kebersihan lingkungan akan terjamin. Pendekatan yang dilakukan dalam dalam program ini adalah pemberdayaan terhadap masyarakat yaitu dengan adanya sosialisasi kesehatan lingkungan hidup.

j) Perencanaan Sehat

Program terakhir dari 10 program PKK adalah perencanaan kesehatan. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kegiatan dalam program perencanaan kesehatan reproduksi karena membantu ibu-ibu, para remaja, dan calon pengantin untuk menjaga kesehatan reproduksi.

Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatan keluarga. Kebutuhan gender praktis dalam program ini adalah menjaga kesehatan keluarga agar tidak terserang penyakit yang berbahaya. Kebutuhan gender strategis adalah dapat mengendalikan jumlah penduduk yang ada di desa Sitirejo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan anti

kemiskinan karena dengan adanya keluarga berencana maka dapat memperkirakan kebutuhan hidup kedepan. Contoh kegiatan dalam program ini adalah KB.

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di Desa Sitirejo, dapat menumbuhkan sikap kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dalam pelaksanaannya, program pemberdayaan agar lebih efektif perlu melibatkan wadah atau organisasi yang sudah ada di masyarakat, seperti misalnya PKK, Karang Taruna, Jama'ah tahlil. Dan juga memperhatikan budaya lokal yang sudah ada di masyarakat seperti sinoman.

Bertolak dari teori mengenai pemberdayaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, bahwa dengan adanya program pemberdayaan di Desa Sitirejo dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat, dimana masyarakat selain memperlihatkan partisipasi yang tinggi pada setiap tahap kegiatan, mendesain proyek kegiatan, mereka juga mampu mengumpulkan dana swadaya dari masyarakat untuk menunjang pembangunan desanya.

Berangkat dari data dan hasil pembahasan mengenai program pemberdayaan masyarakat, maka dapat dirumuskan proposisi yang pertama sebagai berikut:

“Program Pemberdayaan masyarakat di Desa Sitirejo melalui organisasi kemasyarakatan desa seperti PKK, karang taruna berlangsung terbuka, gotong royong dan partisipatif. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi kerakyatan “.

2. Dukungan Budaya Setempat Dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo.

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumberdaya dan pengetahuan yang mereka miliki.

Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dan entry point dari sebuah pembangunan. Midgley (1995) mengemukakan ada beberapa aspek dalam

pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai sumberdaya.

Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya di desentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulant dan memfasilitasikannya.

Banyak pembahasan yang dinamis tentang pembangunan desa, dan diantara berbagai tema yang berulang-ulang dimunculkan. Bryant & White (1987) menyebutkan tiga hal yang penting dan menentukan tentang pembahasan tersebut, yakni :

- a. Pentingnya organisasi lokal yang partisipatif dan berorientasi pada belajar dari pengalaman, yang merupakan salah satu cara pokok untuk menanggulangi kekeliruan-kekeliruan dan ketidakpastian dalam lingkungan pembangunan yang sangat tidak pasti
- b. Tidak dapat hanya dengan mengandalkan kompetensi teknokratik semata-mata yang dianggap sebagai “pemberesan kilat”. Kompetensi tersebut dianggap menggunakan *top down planning* yang kecenderungannya bukannya merupakan bagian dari jalan keluar, melainkan justru merupakan bagian dari permasalahan.
- c. Pentingnya menyimak kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dari masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya.

Kompleksitas budaya lingkungan itu merupakan bagian penting dari kehidupan lokal.

Kompleksitas budaya merupakan keragaman tradisi yang ada di masyarakat. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan telah berlangsung cukup lama. Implementasi program pemberdayaan melalui Tradisi yang sudah ada akan mempermudah pelaksanaan program pemberdayaan. Salah satu tradisi yang ada di masyarakat Sitirejo adalah tradisi Sinoman.

a. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Perkembangan Sinoman di Malang tidak lepas dari Kondisi situasi politik pada jamannya. Hal ini ditunjukkan bahwa pada situasi politik dan ekonomi kacau, Sinoman memperlihatkan fungsi sosialnya yang sangat penting. Terbukti masyarakat Malang menganggap Sinoman sebagai penolong dan tradisi yang perlu dipertahankan. Sebaliknya dalam kondisi sosial ekonomi yang baik relatif Sinoman memperlihatkan fungsi individualismenya yang ditandai oleh lahirnya berbagai usaha jasa yang menggantikan fungsi Sinoman dalam masyarakat.

Sesuai dengan asal-muasal kata “Sinoman” adalah kumpulan anak muda yang suka bergotongroyong, maka di sini kegiatan amal dan sosial harus diutamakan. Artinya, kegiatan sinoman, harus bertujuan untuk membantu sesama dan demi kepentingan bersama. Kecuali itu, kegiatan sinoman harus mampu menghadapi tantangan zaman yang serba komersial dan bernuansa bisnis.

Dalam bahasa Jawa atau Sangskerta, kuat karena rukun dan rukun karena kuat, disebut: “Dharma Eva, Hato Hanti”. Kuat karena bersatu dan bersatu karena kuat. Jadi, motto “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah sebuah kenyataan, mengapa masyarakat Desa Sitirejo memerlukan kekuatan dan kesentosaan? Tidak lain karena dalam kehidupan sehari-hari, kita semua menghadapi berbagai macam persoalan yang hanya dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan bergotongroyong. Lebih-lebih sesama tetangga dekat. Hal ini sudah dialami warga Sitirejo sejak zaman dulu, ketika dijajah Belanda dan Jepang, kemudian saat mempertahankan kemerdekaan, hingga sekarang ini.

Melalui Sinoman, warga Sitirejo dapat mengatasi berbagai masalah. Sinoman merupakan bentuk tertinggi dari jiwa kegotongroyongan. Kegiatan Sinoman, awalnya terlihat dari kebersamaan memasang “terop” atau tenda, menyusun kursi dan alat-alat lainnya saat ada hajatan. Peralatan ini, milik bersama warga yang diperoleh dari “urunan”. Termasuk perlengkapan untuk kematian. Biasanya, di samping mushalla atau langgar, diletakkan “penduso” atau keranda jenazah. Juga alat-alat untuk pemandian jenazah, persediaan kain kafan dan wangi-wangian. Ini apabila untuk kematian. Lain lagi dengan pesta perkawinan, sunatan dan hajatan selamatan. Peralatan yang disimpan di gudang Sinoman adalah: piring, cangkir, gelas, lampu dan sebagainya.

b. Peranan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Sinoman

Sinoman pada awalnya memang sekedar wadah untuk menampung keinginan sekumpulan anak muda. Mereka ini ingin memperoleh pengakuan

sebagai insan yang dipercaya dalam bidang sosial. Karena kegiatan gotongroyong merupakan panggilan hati nurani, maka hal ini tidak sulit untuk diwujudkan. Walaupun demikian, perlu ada pendorong yang mampu menjadi pelopor sebagai penggerak. Karena sinoman merupakan kegiatan anak muda, maka motor penggeraknyapun harus para pemuda. Sudah menjadi hukum alam, bahwa kaum muda merupakan tulang punggung penggerak kegiatan dalam masyarakat. Tidak hanya di bidang sosial dan rumahtangga, tetapi lebih jauh lagi, yakni sebagai patriot pembela bangsa dan negara.

Sinoman dalam kamus Jawa atau “Bausastro Jawi”, karangan WJS Poerwadarminta, berasal dari kata “Sinom”. Sinom artinya: pucuk daun, daun asam muda, bentuk rumah limas yang tinggi dan lancip, nama tambang mocopat, dan nama bentuk keris. Tetapi, jika kata Sinom mendapat tambahan akhiran “an”, menjadi “Sinoman”, maka maknanya menjadi: anak muda yang menjadi peladen di kampung saat acara hajatan, peladen pesta atau perhelatan, tolong menolong saat mendirikan rumah, kerukunan atau gotongroyong. Tetapi di balik semua makna itu, terkandung sesuatu yang amat luhur dan terpuji. Sebab, kegiatan sinoman itu adalah bekerjasama, bergotongroyong yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan orang lain. Rasanya, di alam serba maju dan kehidupan manusia metropolis, makna gotongroyong dan sinoman itu sudah diabaikan orang. Kendati demikian, ternyata hal yang mustahil itu tetap ada dan tidak pernah hilang. Memang, kalau di desa dan di kampung-kampung kehidupan masyarakatnya sangat guyub dan penuh kekeluargaan. Berbeda dengan di kota, yang masyarakatnya individualis, sudah jauh dari kebiasaan itu.

Kegotongroyongan pada kegiatan sinoman di Sitirejo ini nampak dengan adanya pembagian peran secara otomatis, Pada H-2 Laki-laki membuat *terop*, *sarongan*; membuat landasan untuk jenang, dilanjutkan dengan membuat *jenang*; setelah selesai jenang, pawonan langsung dibongkar; membuat *keropak*. Sedangkan wanita mempersiapkan masakan di dapur. Pada hari H, semua pelaku sinoman berdandan, yang muda-mudi berperan sebagai penerima tamu dan meladeni tamu.

c. Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Peranan budaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitirejo

1) Faktor-Faktor Pendukung

a) Faktor Internal

Sebagai sebuah budaya, sinoman memiliki akar yang kuat di masyarakat desa Sitirejo. Terutama di wilayah-wilayah pelosok desa, kehidupan desa masih terasa kental, tradisi sinoman masih banyak ditemui terutama pada saat ada warga yang punya hajat. Tradisi sinoman yang ada di masyarakat juga didukung dengan tradisi-tradisi lain yang juga sudah ada, misalnya tahlilan yang dilakukan rutin setiap minggu, dimana pada pertemuan mingguan tersebut terjalin komunikasi yang erat diantara mereka, Hal ini menimbulkan ikatan kekerabatan yang kuat diantara masyarakat desa, ketika ada yang mau punya hajat, jauh hari sudah terdengar oleh masyarakat, bahkan masyarakat sendiri tanpa di perintah, pada H-2 sudah mulai berdatangan.

b) Faktor Eksternal

Peranan budaya dalam pemberdayaan merupakan daya tarik yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melestarikannya, pada budaya sinoman tidak hanya sebagai budaya lokal yang harus di jaga, namun sinoman terkandung nilai-nilai kegotong royongan yang kuat, sehingga pemerintah berkepentingan menjaga dan melestarikannya agar program-program yang telah dicanangkan dengan mudah diterapkan kepada masyarakat desa.

Melalui pemerintahan di tingkat desa, pemerintah mendorong keberadaan sinoman agar tidak punah, hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan untuk pembangunan desa dengan syarat harus dilakukan secara bergotong royong yang melibatkan masyarakat, seperti adanya program PNPM, melalui fasilitator yang disediakan pemerintah untuk menggali potensi masyarakat desa tanpa merusak budaya yang sudah ada di desa tersebut.

2) Faktor-Faktor Penghambat

a) Faktor Internal.

Keberadaan kaum pemuda dan perempuan dalam kegiatan desa juga membawa warna baru dalam kehidupan pembangunan sosial desa. Dengan semakin tinggi tuntutan kehidupan dan semakin sempit pekerjaan di desa akibat lahan pertanian yang semakin lama berkurang karena pertumbuhan perumahan-perumahan di wilayah Sitirejo, maka kaum muda desa Sitirejo mencari pekerjaan di kota yang memang

lebih menjanjikan, apalagi di tunjang dengan dekatnya perjalanan ke kota Malang.

Tidak adanya kaum muda yang tinggal di desa menjadi faktor penghambat berkembangnya budaya sinoman di desa Sitirejo, sehingga warga yang tinggal dekat kota Malang kecenderungannya memilih yang serba praktis, misalnya memesan makan jadi pada saat mempunyai hajatan. Apalagi sekarang ditunjang oleh bermunculannya persewaan peralatan dan terop yang mudah didapat di desa Sitirejo

b) Faktor Eksternal.

Kondisi sinoman berbeda ketika memasuki pertengahan 1990an ketika Malang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat Malang tidak saja menjadi kota pelajar namun sudah mulai masuk menjadi kota industri dan gerakan urbanisasi yang luar biasa, Sinoman perlahan tapi pasti mengalami kemunduran. Industrialisasi menyebabkan masyarakat Malang disibukkan dengan aktivitas dunia kerja yang padat dan profesional sehingga muncul sikap individualisme. Sikap individualisme yang menyebabkan masyarakat tidak mau berinteraksi di lingkungan rumahnya atau kampung. Segala aktivitas dipenuhi oleh usaha-usaha jasa seperti layanan even organiser pernikahan.

Kegiatan Sinoman terus berkembang dan juga berubah. Pola tradisional yang hidup di desa-desa dalam Kota Malang, mulai dipengaruhi gaya hidup masyarakat kota Metropolitan. Kegiatan kemasyarakatan yang biasanya menjadi bagian dari kegiatan sinoman

yang sepenuhnya bersifat sosial, ada yang sudah beralih menjadi “ajang” bisnis atau sekurang-kurang bernuansakan pamrih. Salah satu contoh yang sangat mencolok adalah kegiatan pemakaman. Kalau dulu, setiap orang terpanggil dan berebut untuk menggotong keranda jenazah atau “penduso”, kini banyak yang berpangku-tangan, menyerahkan kegiatan itu kepada perusahaan yang mengurus penguburan. Hal yang sama juga terlihat saat jenazah akan dikuburkan ke liang lahat. Anak-anak dan keluarga terdekat biasanya langsung terjun menunggu jasad almarhum atau almarhumah di dalam lubang kuburan, kini adakalanya dilakukan oleh “orang lain”. Yang lebih tragis lagi, untuk memandikan dan mendoakan jenazah almarhum atau almarhumah juga ada yang “diserahkan” kepada orang lain. Ini, karena modin tidak ada di kawasan permukiman itu. Kalau “orang lain” itu adalah tetangga dan kerabat keluarga yang sedang berduka, masih tidak masalah, karena sifatnya masih sosial dan sukarela. Tetapi, kalau yang manggali, menguburkan sampai menimbun kembali tanah ke lubang kuburan semuanya “orang lain” yang dibayar dan berasal dari perusahaan jasa penguburan atau pemakamam, maka akan lenyaplah ajaran agama Islam dan tradisi nenek moyang kita.

Seandainya hanya membawa jenazah karena tempat pemakaman jauh dari rumah duka dengan mobil jenazah harus dibayar, rasanya masih wajar. Begitu pula menggali dan menimbun kembali tanah ke lubang kubur dilakukan oleh para penggali khusus yang sudah

ada di lokasi pemakaman, semua itu masih dapat dimaklumi. Tetapi, kalau sampai hal-hal yang khusus sesuai dengan ajaran agama dan tradisi semua “diborongkan” kepada perusahaan pengelola jenazah dan pemakaman, tentu sangat menyedihkan. Sebab tradisi seperti itu, hanya lumrah kita saksikan pada masyarakat non Muslim, seperti warga Tionghoa atau Cina, misalnya.

Kegiatan bisnis pengurusan jenazah dan pemakaman di kalangan umat Islam dan “Arek Malang”, kalau tidak segera dibendung, bisa saja terjadi seperti yang berlaku di masyarakat non Muslim itu. Suatu saat akan kita saksikan pola pengurusan jenazah seperti dalam kehidupan masyarakat Tionghoa.

Kalau dulu, pada saat “Sinoman Lama”, warga keturunan Cina, Arab dan India menjadi warga elite yang “dimanjakan” penjajah, setelah Indonesia merdeka, mereka secara bertahap melibatkan diri dalam kegiatan di lingkungan permukiman. Hal ini juga terjadi di desa Sitirejo, para pendatang yang tinggal di wilayah desa Sitirejo mulai bisa menyatu dan membaur dengan warga sekitar. Di beberapa kawasan permukiman, merangkap duduk sebagai pengurus sinoman. Untuk menghidupi organisasi sosial sinoman ini, bukan tidak ada yang berbau bisnis. Dari iuran dan sumbangan warga, dibelikan barang-barang keperluan hajatan. Mulai dari terop (tenda), kursi, meja, piring, gelas, sendok, sampai alat pengeras suara (sound system). Agar barang-barang ini tetap utuh dan bisa bertambah, maka kepada yang menggunakannya diharapkan bantuan sukarela. Memang, ada tarif

yang ditetapkan untuk masing-masing barang, tetapi bagi keluarga yang tidak mampu dan benar-benar dalam keadaan susah, dipinjamkan secara gratis. Bahkan mendapat bantuan uang duka dari urunan warga.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dirumuskan proposisi yang kedua sebagai berikut:

“Dukungan budaya masyarakat setempat terhadap implementasi program pemberdayaan terlihat dari nilai-nilai kekeluargaan, kerjasama, kegotong-royongan dan kebersamaan yang memberikan kontribusi keberhasilan penerapan program”.

3. Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelestarian Budaya Masyarakat Di Desa Sitirejo.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Hal ini ditambahkan oleh Prasojo (2004).

Terdapat empat strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan/ desa, yaitu (1) memberdayakan masyarakat dengan “mensosialisasikan” peran masyarakat sebagai subyek, (2) mendayagunakan “mekanisme” penyelenggaraan pembangunan/ pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokratis, efektif dan efisien, (3) mobilisasi “sumber daya” manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya, dan (4) memaksimalkan peran pemerintah khususnya pemerintahan kelurahan dalam memfasilitasi dan mengatur guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

Pambudi (2003) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat berarti ;

(1) pemberdayaan bermakna kedalam yang berarti suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat dan sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka; (2) pemberdayaan bermakna

keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat itu Winarni dalam Sulistiyani (2004) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau sumber daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Jadi pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Sejalan dengan itu, pelaksanaan program pemberdayaan di desa Sitirejo terjadi proses peralihan kemampuan dari pendamping kegiatan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil temuan peneliti pada program simpan pinjam perempuan, dimana terjadi proses peralihan manajemen keuangan terhadap kelompok perempuan sehingga perempuan mampu dan berdaya untuk dirinya sendiri dan keluarga.

Proses pemberdayaan ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama melalui tradisi sinoman, namun bentuknya berbeda, pada tradisi sinoman masyarakat saling membantu, bergotong royong dan kebersamaan. Berjalannya program pemberdayaan di Sitirejo karena dalam pelaksanaannya mengikuti tradisi sinoman yang sudah ada di masyarakat.

Masyarakat Desa Sitirejo sebagai bagian dari masyarakat Jawa mempunyai tradisi yang sangat beragam, dan keberadaan tradisi ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah masyarakat Jawa itu sendiri. Ia menjadi simbol yang sarat dengan muatan lokal dan dipraktikkan sebagai salah satu cara dalam pendekatan sosial di masyarakat. Tradisi yang ada juga diperkuat dengan sistem kelembagaan

atau organisasi desa dan sistem kemasyarakatan atau kekerabatan yang sudah ada di desa tersebut. Tradisi yang ada ini di tunjang dengan kehidupan ekonomi dan budaya religi yang telah mengakar lama di masyarakat desa Sitirejo. Salah satu dari tradisi tersebut adalah tradisi sinoman yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa dan menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.

Sinoman bagi masyarakat Jawa adalah aktivitas memberikan sumbangan atau nitip barang dan menagihnya kembali ketika sedang membutuhkan. Aturan mengenai sinoman memang hampir tidak tertulis, tetapi tidak pernah terjadi pengingkaran dan selalu terpenuhi ketika si penyimpan membutuhkannya.

Tradisi seperti ini merupakan bagian dari upaya masyarakat dalam mengorganisasikan diri, menata kehidupan bersama dan menginternalisasikan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Sinoman yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat Jawa mempunyai banyak bentuk. Di antaranya adalah, pertama, sinoman menggarap sawah. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Jawa adalah petani. Ketika musim tanam atau panen tiba, mereka membutuhkan banyak tenaga. Karena tenaga yang dibutuhkan banyak, mereka merasa keberatan kalau menggaji tenaga tersebut. Maka sebagian mereka melakukan sinoman tenaga dalam mengerjakan sawah atau ladang.

Kedua, sinoman dana dan sambatan membangun rumah. Membangun rumah biasanya membutuhkan banyak biaya, maka mereka menabung terlebih dulu dengan tradisi sinoman ini. Tetangga yang mendirikan rumah terlebih dahulu dibantu oleh tetangga lain dengan menyumbangkan apa-apa yang dibutuhkan oleh orang yang mendirikan rumah tersebut. Ketika si penyumbang akan mendirikan

rumah, ia bisa memutuskan kapan memulai mendirikan rumah walaupun dana yang tersedia belum mencukupi, karena ia bisa menerima sinoman dari tetangga-tetangganya, dan giliran tetangganya mendirikan rumah ia mengembalikan sinoman yang dulu pernah ia terima, begitu seterusnya.

Ketiga, sinoman pindah rumah. Ketika sebuah keluarga akan memisahkan diri dari induk keluarganya, maka biasanya dalam tradisi di Jawa dirayakan dengan besar-besaran, dengan upacara selamatan, prosesi pindahan dengan diiringi tetangga sekitar dan mereka menjenguk orang yang baru pindahan tersebut. Semua prosesi itu membutuhkan dana yang cukup banyak. Untuk meringankan beban keluarga yang sedang pindahan, mereka melakukan tradisi sinoman.

Keempat, sinoman mempunyai hajat manten dan sunatan. Orang yang sedang mempunyai hajat besar seperti manten, ngunduh mantu dan sunatan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena kegiatan-kegiatan tersebut mengundang banyak tamu untuk menghadiri acaranya, serta mengundang tetangga dan saudara untuk selamatan. Hal ini kalau ditanggung sendirian oleh tuan rumah akan memberatkan, sehingga lebih ringan apabila dilaksanakan dengan sinoman. Sinoman hajatan ini biasanya menawarkan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang punya hajatan, seperti beras, daging, kelapa, rokok, makanan dan sebagainya.

Tradisi sinoman yang dilakukan oleh masyarakat Jawa merupakan bagian dari kearifan lokal yang menunjukkan khasanah budaya bangsa. Budaya seperti ini patut kita lestarikan bahkan dikembangkan karena selain mempunyai muatan

lokal, tradisi sinoman juga mempunyai makna yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tradisi sinoman sudah melekat pada masyarakat Jawa, terutama setiap aktivitas dan kegiatan yang membutuhkan banyak orang. Bagi mereka, sinoman mempunyai makna yang sangat penting, yaitu: pertama, makna sosial. Tradisi sinoman dijadikan sebagai media mempertemukan antar anggota masyarakat. Ditinjau dari dimensi sosial, masyarakat Jawa meyakini bahwa sinoman mampu menjadi perekat sosial. Sinoman dapat mempertemukan masyarakat tanpa melihat status sosial dan mempertemukan mereka dalam satu kepentingan. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin.

Kedua, semangat gotong royong. Hal ini dapat diamati dari praktik sinoman itu sendiri, dimana setiap anggota masyarakat saling membantu, tanpa melihat status seseorang. Dengan demikian, suatu pekerjaan dan kegiatan yang awalnya berat dan membutuhkan dana banyak, bisa menjadi ringan. Tidak ada suatu kegiatan yang tidak terlaksana hanya gara-gara tidak ada dana atau tenaga yang membantu. Tradisi sinoman ini sejalan dengan semangat bangsa Indonesia, yakni semangat gotong royong. Bila tradisi ini dihidupkan terus maka akan mengurangi tingkat kemiskinan dan bisa mengikis kesenjangan sosial.

Ketiga, makna ekonomi. Ketika BBM naik yang dibarengi dengan kenaikan harga, kebutuhan masyarakat semakin naik juga. maka sinoman dengan semangat gotong royong dan kebersamaannya membantu warga yang akan mengadakan hajatan.

Keempat, makna spiritual. Masyarakat Jawa mempunyai pandangan bahwa melaksanakan sinoman dapat mendekatkan diri pada agama, karena

terkandung nilai-nilai ajaran agama tentang hubungan antar manusia yang diajarkan oleh agama.

Dengan adanya pelaksanaan program pemberdayaan melalui tradisi yang ada di masyarakat pada dasarnya program tersebut ikut mendorong pelestarian tradisi budaya yang ada.

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat di desa Sitirejo dapat dirumuskan proposisi sebagai berikut:

“Pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan melalui organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat ikut mendorong pelestarian budaya dan memacu tingkat kemandirian desa dan masyarakat desa Sitirejo”.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di desa Sitirejo kecamatan Wagir Kabupaten Malang terkait dengan peran tradisi sinoman dalam pemberdayaan masyarakat desa serta pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dukungan organisasi kemasyarakatan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo berlangsung terbuka, gotong royong dan partisipatif. Dukungan tersebut antara lain : 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga melalui lembaga PKK, 2) Program Pembangunan melalui PNPM berupa pembangunan prasarana jembatan yang melibatkan karang taruna dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam perempuan yang dikoordinir kelompok PKK, 3) pembangunan instalasi Biogas melalui kelompok peternak.
2. Dukungan budaya terhadap implementasi program pemberdayaan terlihat dari nilai-nilai kekeluargaan, kerjasama, kegotong-royongan dan kebersamaan yang memberikan kontribusi keberhasilan penerapan program pemberdayaan.
3. Faktor yang mendukung peranan budaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitirejo adalah 1) Masyarakat desa Sitirejo yang sebagian besar berada di daerah pelosok desa dengan kehidupan alamnya yang masih kuat sehingga suasana kekeluargaannya masih tinggi, 2) tradisi lain seperti

tahlilan, PKK dan lain-lain yang dilakukan secara rutin mingguan membuat komunikasi antar warga sangat erat, kondisi ini menimbulkan ikatan kekerabatan yang kuat diantara masyarakat desa, 3) Dukungan pemerintah melalui pemerintahan di tingkat desa untuk melestarikan kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai kegotong royongan tinggi yang nantinya mempermudah pemerintah untuk menjalankan program-program pemberdayaan bagi masyarakat desa Sitirejo.

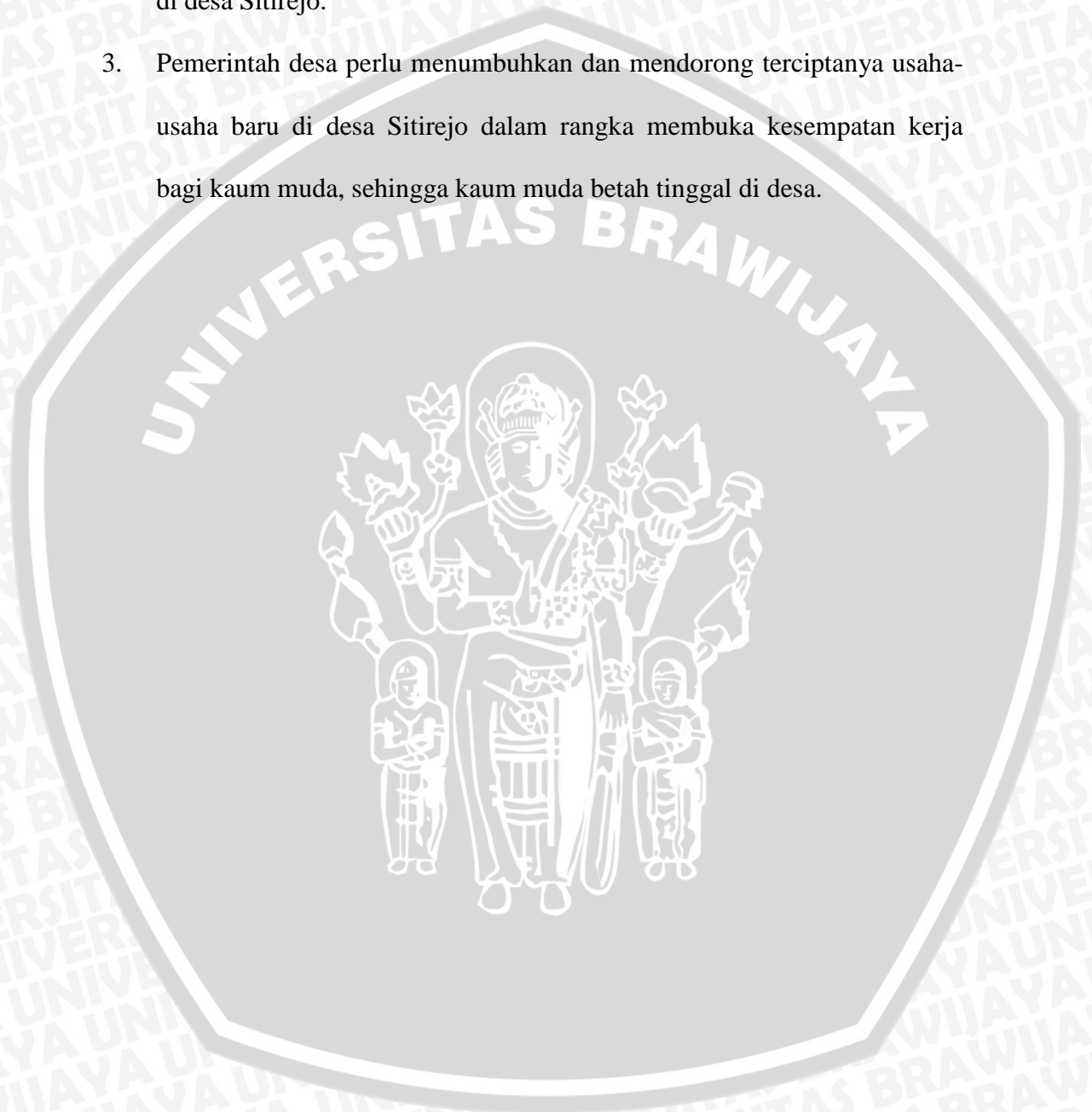
4. Faktor yang menghambat peranan budaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitirejo adalah 1) Sepinya kaum muda yang tinggal di desa akibat semakin sempitnya pekerjaan di desa karena lahan pertanian yang semakin lama semakin berkurang, 2) adanya kegiatan bisnis dan terjadinya industrialisasi yang masuk ke wilayah desa Sitirejo yang tidak dapat dielakkan.
5. Pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan melalui organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat ikut mendorong pelestarian budaya dan memacu tingkat kemandirian desa dan masyarakat desa Sitirejo melalui semangat kekeluargaan, kegotong-royongan dan kebersamaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dipaparkan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Sitirejo perlu menjaga organisasi kemasyarakatan yang telah ada di masyarakat sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di desa Sitirejo dapat mudah di implentasikan..

2. Untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memelihara dan melestarikan budaya, Pemerintah melalui pemerintah desa perlu mensosialisasikan dengan warga pendatang agar mengenali budaya lokal di desa Sitirejo.
3. Pemerintah desa perlu menumbuhkan dan mendorong terciptanya usaha-usaha baru di desa Sitirejo dalam rangka membuka kesempatan kerja bagi kaum muda, sehingga kaum muda betah tinggal di desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Cahyadi dan E. Feernando M. Manulang, 2007. Pengantar Ke Filsafat Hukum, Prenada Media, Jakarta
- Arbi Sanit, 1986, Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan, Rajawali Press, Jakarta
- Asy'ari Imam Sapari, 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Usaha Nasional, Indonesia.
- Bryant, Corralie, Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah S. 1980. *Sosiologi*. Pt. Bina Ilmu. Surabaya.
- Friedmann, Jhon. 1992, *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. Blackwell Publisher. Canbridge, Massachusetts, 02142 USA.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2009. Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Korten. D.C& Sjahrir, 1987. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, yayasan obor Indonesia.
- Midgley, James. 1995. *Social Development: The Development Perspective On Social Welfare*. Sage Publication, London
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1987. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990. *Pembangunan Masyarakat mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pambudi, Himawan S, 2003. *Politik Pemberdayaan*. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Jawa atau Bausastro Jawi*.

_____, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hal.351

Prasojo, Eko. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

Prijono dan Pranarka, 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.

Rahardjo. 2004. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Siagian, S.P, 2003. *Administrasi Pembangunan*, Cetakan I Gunung Agung, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PTRaja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemardjan, Selo, 1992, " *Otonomi desa Apakah Itu* " *Dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. PT Gramedia Jakarta.

Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta, Bandung

Sulistiyani, Ambar T., 2004. *Kemitraan Dan Model Pemberdayaan*, Gaya Media Jogja, Yogyakarta.

Suryono. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*, UM Press, Malang.

----- 2002, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, LAN Jakarta.

Tjokrowinoto, M. 1995. *Politik Pembangunan*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Lembar Bacaan Balai Besar PMD, 2005. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. BBPMD, Malang

<http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> (diakses pada tanggal 5 November 2009).

http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial_budaya (diakses pada tanggal 5 November 2009).

<http://www.scribd.com/doc/18266644/perubahan-kebudayaan> (diakses pada 5

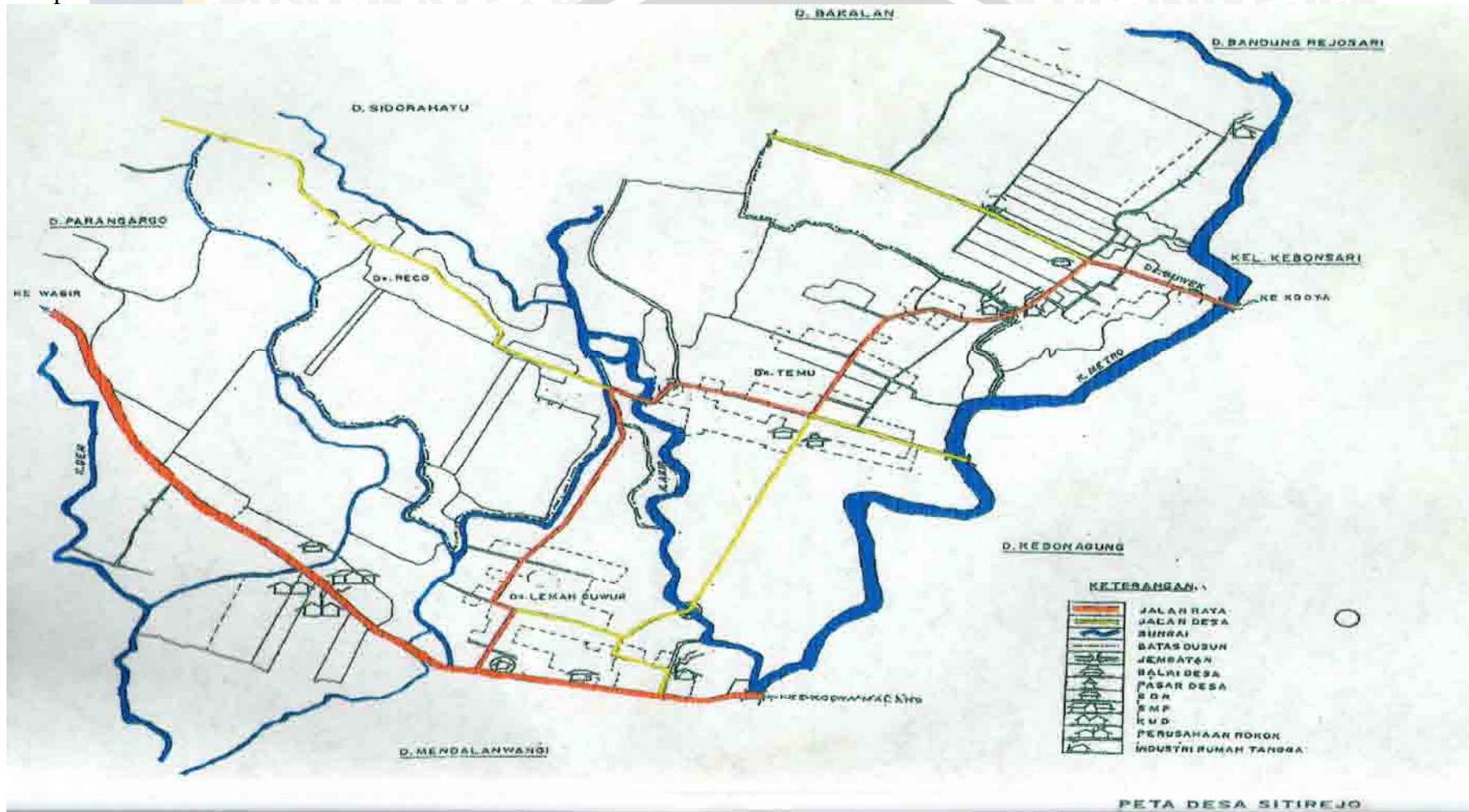
November 2009).

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/10/03/82598/Memaknai.Tradisi.Sinoman>. (diakses pada tanggal 13 November 2009).

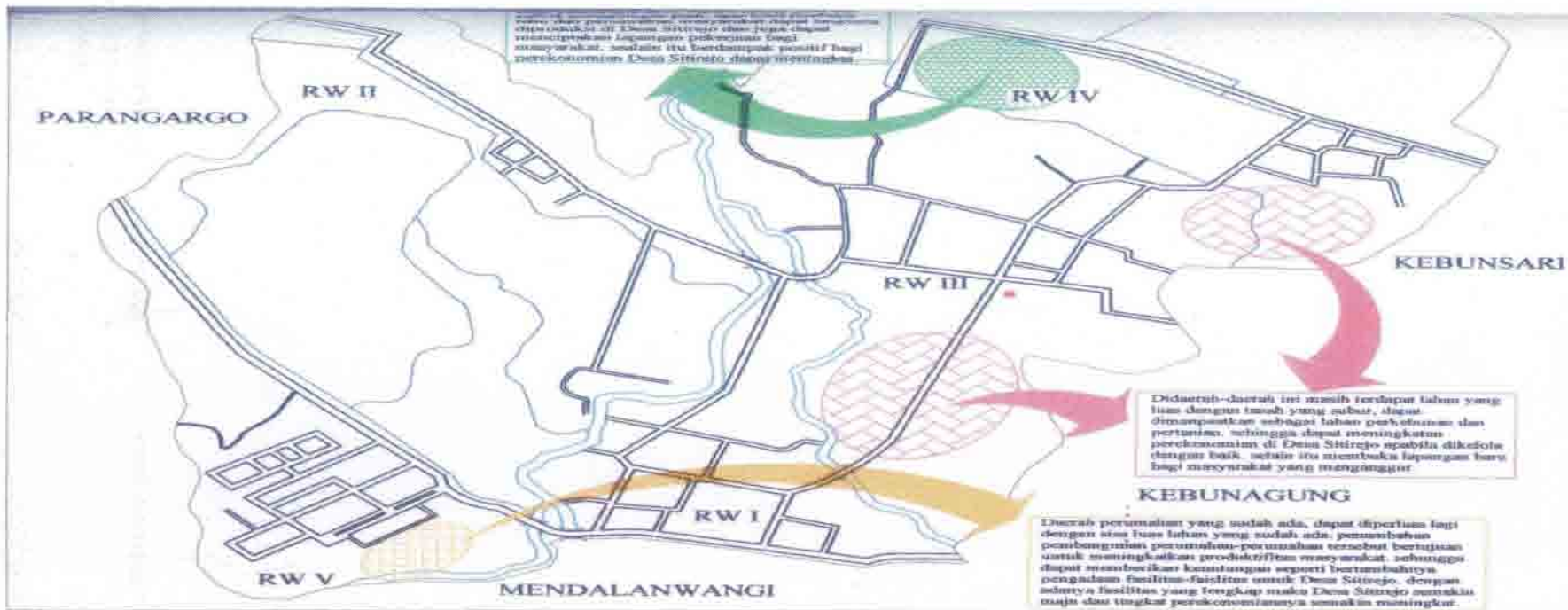
<http://dipra.wordpress.com/> (diakses pada tanggal 13 November 2009).



Lampiran 1



PETA POTENSI DESA



DESA SITIREJO

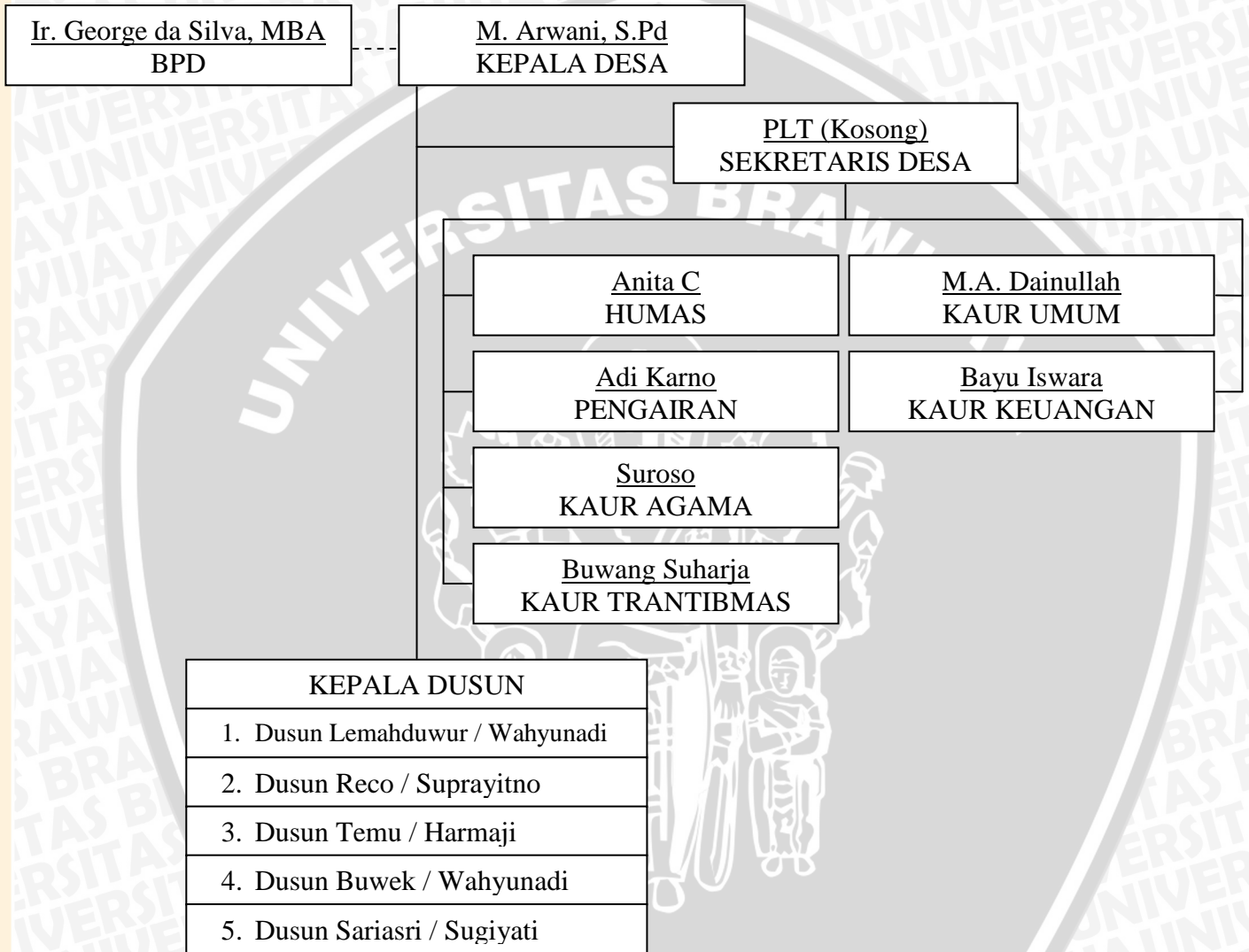
PETA ASPIRASI



PETA TATA GUNA LAHAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SITIREJO



Ket:

Garis Koordinasi : ———

Garis Komando : - - - - -



Gambar Kantor Desa Sitirejo



Gambar Wawancara dengan Kepala Desa dan Aparat Desa Sitirejo



Gambar Kegiatan Sinoman H-2 (Ibu-ibu membantu Memasak)



Gambar Kegiatan Sinoman H-1 (Ibu-ibu membantu Memasak)



Gambar Kegiatan Sinoman H-1 (para pemuda sedang memasang terop)



Gambar Kegiatan Sinoman H-1 (para pemuda sedang memasang meja)

INTERVIEW GUIDE**A. Responden : Pemerintah Desa**

1. Apa saja Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Sitirejo ?
2. Siapa saja Pihak-pihak yang terkait dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Sitirejo ?
 - Tugas atau Peran dari Pihak-pihak yang terkait dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitirejo ?
3. Adakah Lembaga Tradisional di Desa Sitirejo ?
 - Sebutkan Lembaga Tradisional yang terdapat di Desa Sitirejo ?
 - Bagaimana Peran Lembaga Tradisional tersebut ? Apakah telah berfungsi dengan baik !
 - Apakah koordinasi Lembaga Tradisional dengan Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik ? Jelaskan bentuk konkritnya !
4. Menurut pendapat anda sebagai Aparatur Desa bagaimanakah Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
 - Dan sejauh mana perkembangannya ?
 - Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
 - Siapa saja Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
5. Bagaimanakah dampak Tradisi Sinoman terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo ini ?
6. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo dari segi intern dan ekstern ?
7. Faktor apakah yang menjadi Pendukung Pelaksanaan Tradisi Sinoman sehingga meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo ?

B. Responden : Masyarakat

1. Apa saja Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Sitirejo ?
2. Siapa saja Pihak-pihak yang terkait dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Sitirejo ?

- Tugas atau Peran dari Pihak-pihak yang terkait dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitirejo ?
3. Adakah Lembaga Tradisional di Desa Sitirejo ?
 - Sebutkan Lembaga Tradisional yang terdapat di Desa Sitirejo ?
 - Bagaimana Peran Lembaga Tradisional tersebut ? Apakah telah berfungsi dengan baik !
 - Apakah koordinasi Lembaga Tradisional dengan Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik ? Jelaskan bentuk konkritnya !
 4. Menurut pendapat anda sebagai anggota Masyarakat bagaimanakah Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
 - Dan sejauh mana perkembangannya ?
 - Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
 - Siapa saja Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
 5. Bagaimanakah dampak Tradisi Sinoman terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo ini ?
 6. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo dari segi intern dan ekstern ?
 7. Faktor apakah yang menjadi Pendukung Pelaksanaan Tradisi Sinoman sehingga meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo ?

C. Responden : LPMD

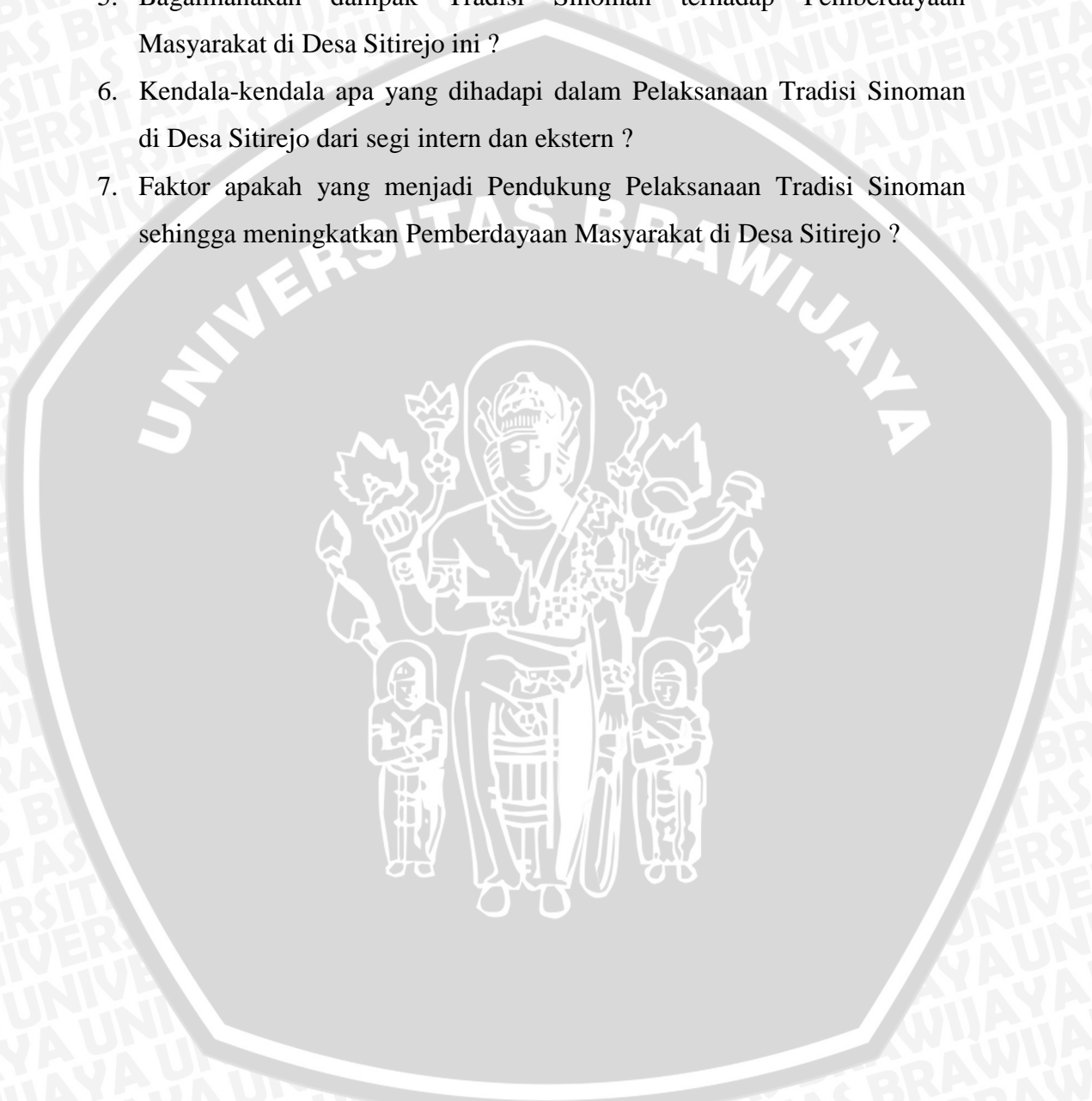
1. Apa saja Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Sitirejo ?
2. Siapa saja Pihak-pihak yang terkait dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Sitirejo ?
 - Tugas atau Peran dari Pihak-pihak yang terkait dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitirejo ?
3. Adakah Lembaga Tradisional di Desa Sitirejo ?
 - Sebutkan Lembaga Tradisional yang terdapat di Desa Sitirejo ?
 - Bagaimana Peran Lembaga Tradisional tersebut ? Apakah telah berfungsi dengan baik !

- Apakah koordinasi Lembaga Tradisional dengan Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik ? Jelaskan bentuk konkritnya !
4. Menurut pendapat anda sebagai anggota LPMD bagaimanakah Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
 - Dan sejauh mana perkembangannya ?
 - Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
 - Siapa saja Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
 5. Bagaimanakah dampak Tradisi Sinoman terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo ini ?
 6. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo dari segi intern dan ekstern ?
 7. Faktor apakah yang menjadi Pendukung Pelaksanaan Tradisi Sinoman sehingga meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo ?

D. Responden : Karang Taruna

1. Apa saja Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Sitirejo ?
2. Siapa saja Pihak-pihak yang terkait dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Sitirejo ?
 - Tugas atau Peran dari Pihak-pihak yang terkait dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitirejo ?
3. Adakah Lembaga Tradisional di Desa Sitirejo ?
 - Sebutkan Lembaga Tradisional yang terdapat di Desa Sitirejo ?
 - Bagaimana Peran Lembaga Tradisional tersebut ? Apakah telah berfungsi dengan baik !
 - Apakah koordinasi Lembaga Tradisional dengan Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik ? Jelaskan bentuk konkritnya !
4. Menurut pendapat anda sebagai anggota Karang Taruna bagaimanakah Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
 - Dan sejauh mana perkembangannya ?

- Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
 - Siapa saja Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo ?
5. Bagaimanakah dampak Tradisi Sinoman terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo ini ?
 6. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tradisi Sinoman di Desa Sitirejo dari segi intern dan ekstern ?
 7. Faktor apakah yang menjadi Pendukung Pelaksanaan Tradisi Sinoman sehingga meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sitirejo ?





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN MALANG
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang
Nomor : 072/ 212 /421.206/2010

Menunjuk : Surat dari Ketua Jurusan Adm. Publik FIA UNIBRAW Malang nomor,
2442/J10/1.14/PG/2010 tanggal, 23 Maret 2010 perihal, izin penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan penelitian Oleh :

Nama / Instansi : **PURWANDINI MEY NINGTIYAS / Mhs. FIA UNIBRAW Malang**
Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang
Thema / Judul / survey /Research : Peran Tradisi sinoman dalam pemberdayaan Masyarakat Desa (Study pada Desa Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang
Daerah / tempat kegiatan : Desa Sitirejo Kec. Wagir
Lamanya : April s/d Juni 2010
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melaporkan kepada Pejabat setempat ;
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Malang, 01 April 2010
An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG
Kabid Kewaspadaan Daerah

Drs. SUMADI, M.Si
Pembina

NIP. 199620327 198903 1 011

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Sdr. Kajar Adm. Publik FIA UNIBRAW Malang
 2. Sdr. Camat Wagir Kab. Malang
 3. Sdr. Mhs. Ybs
 4. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KANTOR CAMAT WAGIR

Jln. Raya Parangargo 57 Telepon 0341 – 804662 Malang
WAGIR – 6515

Wagir, 3 April 2010

Nomor	: 072/421.608/2010	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Kepala Desa Sitirejo	
Lampiran	: -	di-	
Perihal	: <u>Survey/ Research</u>		<u>SITIREJO</u>

Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, tanggal 1 April 2010 Nomor : 072/21.7/421.206/2010 pokok surat diatas, maka dengan ini diberitahukan bahwa di desa Saudara akan diadakan/ditempati kegiatan Survey/ Research yang dilaksanakan oleh :

Nama/ Instansi : **PURWANDINI MEY NINGTIYAS/ Mhs. FIA UNBRA Malang**
 Alamat : **Jl. MT. Haryono 163 Malang**
 Thema : **Peran Tradisi Sinoman dalam pemberdayaan Masyarakat Desa (Study pada Desa Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang)**
 Tempat kegiatan : **Desa Sitirejo Kecamatan Wagir**
 Lama kegiatan : **April s/d Juni 2010**
 Pengikut : **-**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati segala peraturan yang ada;
2. Semua kegiatan harus koordinasi dengan aparat yang ada;
3. Semua kegiatan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
4. Selesai kegiatan harap melaporkan kepada Muspika Wagir

Demikian atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Drs. EK. HAFI LUTFI,MM
Pembina Tingkat I
Nip. 19610813 199001 1 001

Tambahan:
Yth. 1. Sdr. Dan Ramil Wagir
2. Sdr. Kapcisek Wagir



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KANTOR CAMAT WAGIR**

Jl. Raya Parangargo 57 Telepon 0341-804552 Malang
WAGIR – 65158

SURAT KETERANGAN

No. 072/289/421.608/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUDJI ALI, S. Sos
NIP : 19581114 1988309 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Wagir
Alamat : Jl. Raya Parangargo 57 Wagir

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PURWANDINI MEY NINGTIYAS / Mhs. FIA UNBRA Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang
Thema : Peran Tradisi Sinoman dalam pemberdayaan Masyarakat Desa
(Study pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)
Tempat Kegiatan : Desa Sitirejo Kecamatan Wagir

Mahasiswa tersebut diatas pada hari ini Jum'at tanggal 3 Agustus 2012 melapor pada kami bahwa telah selesai melaksanakan kegiatan Survey / Penelitian di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang mulai bulan April s/d Juni 2010 sesuai surat Keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Malang Tanggal 1 April 2010 Nomor : 072/212/421.206/ 2010 perihal Survey/ Research.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wagir, 3 Agustus 2012



MUDJI ALI, S. Sos.
NIP. 19581114 1988309 1 002



CURRICULUM VITAE

Nama : Purwandini Mey N.
Nomor Induk Mahasiswa : 0510313103
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 23 Mei 1987
Pendidikan : 1. SD Negeri Banjar Bendo Sidoarjo Tamat Tahun 1999
2. SMP Negeri 4 Sidoarjo Tamat Tahun 2002
3. SMA Negeri 3 Sidoarjo Tamat Tahun 2005

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Sie Kepribadian Budi Pekerti Luhur OSIS SMA Negeri 3 Sidoarjo Periode 2002-2003
2. Anggota Sie Perlengkapan dan Inventaris Kepengurusan Perisai Diri SMA Negeri 3 Sidoarjo Periode 2002-2003
3. Anggota Sendratari SMA 3 Sidoarjo Periode 2002-2003
4. Wakil Sekretaris Kepengurusan Perisai Diri SMA Negeri 3 Sidoarjo Periode 2003-2004
5. Ketua Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMA Negeri 3 Sidoarjo Periode 2003-2004
6. Staf Sosial dan Politik BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) FIA Universitas Brawijaya Periode 2006-2007
7. Anggota Sie Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Humanistik (Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik) FIA Universitas Brawijaya Periode 2006-2007
8. Pengurus dan Anggota Kartika Candra FIA Universitas Brawijaya Periode 2005-2007

Pengalaman Kepanitian :

1. Bendahara II Gelar Seni dan Malam Amal "Gebyar" SMA Negeri 3 Sidoarjo Tahun 2003
2. Sie Acara Panitia Diklat Perisai Diri SMA Negeri 3 Sidoarjo Tahun 2003
3. Panwas (Panitia Pengawas) LKSS OSIS SMA Negeri 3 Sidoarjo Tahun 2003

4. Wakil Bendahara "LAPD (Latihan Alam Perisai Diri)" SMA Negeri 3 Sidoarjo Tahun 2004
5. Sie Konsumsi Baksos Humanistik Tahun 2005
6. Sie Konsumsi "HEO (Humanistik Election Organizer)" Tahun 2006
7. Panwas (Panitia Pengawas) Pemilwa FIA Tahun 2006
8. Sie Mentor "GLADIATOR" Ospek Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2006
9. Sie Kesehatan "PUBLICA 2" Ospek Jurusan Administrasi Publik fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2006
10. Sie Acara Panitia Diklat Kartika Candra FIA Universitas Brawijaya Tahun 2006
11. Sie Konsumsi Panitia Persmatour Humanistik Tahun 2007

Prestasi :

1. Juara 1 Pertandingan Beregu Putri Perisai Diri UBAYA Cup Tahun 2004

